

# LAPORAN

Kinerja Instansi Pemerintah

# 2020



dprmpstsp

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Basuki Rahmat No. 56 Samarinda 75112

Telp: (0541) 743235, 743487, 743487, 201372

Fax: (0541) 736446

Website: [dprmpstsp.kaltimprov.go.id](http://dprmpstsp.kaltimprov.go.id)

## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi BPPMD Prov. Kaltim sebagai aparatur pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur yang menangani urusan perijinan, promosi dan investasi pada Tahun Anggaran 2020. Penyusunan Laporan Kinerja ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Rencana Strategis DPMPTSP Prov. Kaltim Tahun 2019-2023.

Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, saran, dan kritik dalam menyelesaikan LKjIP ini. Semoga LKjIP DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan khususnya bagi aparatur DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur menjadi dasar perbaikan dan peningkatan kinerja bagi seluruh unit kerja di lingkungan DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur dalam kemudahan proses pelayanan perizinan dan non perizinan dan menumbuhkan iklim investasi serta pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur.

Samarinda, Februari 2021  
Kepala DPMPTSP Prov. Kaltim,



**Puguh Harjanto, S. STP, M. Si**  
PEMBINA TINGKAT I / IV B  
NIP. 197908101 9980 2 1001

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 menunjukkan peningkatan, dari alokasi anggaran sebesar Rp. 26.003.760.790,- ( Dua puluh Enam Milyar Tiga Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Rupiah) dengan perincian yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) Rp. 9.740.012.000,-dengan realisasi Rp. 6.467.860.935,- (66,41%) dan Belanja Langsung (BL) Rp. 18.012.575.871, dengan realisasi Belanja Langsung sebesar Rp. 11.544.741.936,- (70,99%).

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Dasar Pembentukan Organisasi .....	01
B. Tugas dan Fungsi .....	04
C. Struktur Organisasi .....	05
D. Sumber Daya Manusia.....	06
E. Aspek Strategis Organisasi .....	07
F. Permasalahan Utama (Isu Strategis) .....	08
G. Sarana dan Prasarana Kerja .....	12
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	
A. Perencanaan Strategis .....	14
B. Indikator Kinerja Utama .....	17
C. Perjanjian Kinerja .....	17
1. Rencana Anggaran Tahun 2019.....	18
2. Target Belanja DPMPTSP Prov. Kaltim Tahun 2019 .....	18
3. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis .....	20
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
A. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun Sebelumnya.....	21
1. Nilai Hasil Akuntabilitas Kinerja .....	21
2. Tindak Lanjut Atas Hasil Evaluasi Inspektorat .....	21
B. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi .....	28
1. Realisasi Investasi PMDN .....	28
2. Realisasi Investasi PMA .....	30
3. Kumulatif Realisasi Investasi PMDN dan PMA .....	34
4. Izin yang diterbitkan DPMPTSP Prov. Kaltim.....	36
5. Izin yang diterbitkan melalui <i>Online Submission Single</i> (OSS) .....	37
C. Analisis Capaian Kinerja .....	38
1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja.....	38
2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu.....	39
3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target RPJMD dan Renstra .....	39
4. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan .....	39
5. Analisis Program/ Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan .....	42
6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	54

	7. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Anggaran Program/ Kegiatan .....	55
D.	Realisasi Anggaran .....	56
	1. Realisasi Anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja.....	56
	2. Realisasi Anggaran Per Program dan Kegiatan.....	57
<b>BAB</b>	<b>IV</b> <b>PENUTUP</b> .....	<b>67</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Sumber Daya Aparatur DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur .....	07
Tabel 1.2	Sarana dan Prasarana DPMPTSP Prov. Kaltim .....	13
Tabel 2.1	Perencanaan Sasaran Strategis .....	16
Tabel 2.2	Program / Kegiatan Untuk Mencapai Tujuan / Sasaran .....	17
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Utama.....	17
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja 2020.....	18
Tabel 2.5	Target Belanja DPMPTSP Prov. Kaltim 2020.....	19
Tabel 2.6	Anggaran Belanja Langsung Per Sasaran Strategis .....	20
Tabel 3.1	Tabel Nilai Hasil AKIP .....	21
Tabel 3.2	Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Inspektorat Provinsi.....	21
Tabel 3.3	Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi.....	27
Tabel 3.4	Realisasi Investasi PMDN Berdasarkan Lokasi di Kalimantan Timur Periode Januari - Desember 2020.....	28
Tabel 3.5	Realisasi Investasi PMDN Berdasarkan Sektor Usaha di Kalimantan Timur Periode Januari-Desember 2020.....	30
Tabel 3.6	Realisasi Investasi PMA Berdasarkan Lokasi di Kalimantan Timur Periode Januari - Desember 2020.....	31
Tabel 3.7	Realisasi Investasi PMA Berdasarkan Sektor Usaha di Kalimantan Timur Periode Januari - Desember 2020.....	34
Tabel 3.8	Realisasi Investasi PMDN dan PMA di Kalimantan Timur Periode Januari - Desember 2020.....	34
Tabel 3.9	Rekapitulasi Perizinan Sektor Periode Januari-Desember 2020 .....	37
Tabel 3.10	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja .....	37
Tabel 3.11	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun (n dan n-1) .....	38
Tabel 3.12	Realisasi Kinerja dan Target Akhir RPJMD/ RENSTRA.....	39
Tabel 3.13	Pelanggan ( <i>Responden</i> ) Periode Januari-Juni 2020 .....	47
Tabel 3.14	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	54
Tabel 3.15	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Anggaran Program/ Kegiatan.....	55
Tabel 3.16	Realisasi Keuangan .....	56
Tabel 3.17	Realisasi Anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja .....	56
Tabel 3.18	Realisasi Anggaran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran .....	57
Tabel 3.19	Realisasi Anggaran Program Sarana dan Prasarana Aparatur .....	58
Tabel 3.20	Realisasi Anggaran Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah .....	59
Tabel 3.21	Realisasi Anggaran Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah .....	60
Tabel 3.22	Realisasi Anggaran Program Kemudahan Pelayanan dan Percepatan Proses Perijinan .....	61
Tabel 3.23	Realisasi Anggaran Program Pengendalian Pelaksanaan Investasi .....	62
Tabel 3.24	Realisasi Anggaran Program Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal .....	63
Tabel 3.25	Realisasi Anggaran Program Layanan Advokasi dan Informasi Perizinan.....	64
Tabel 3.26	Realisasi Anggaran Program Penyelenggaraan Promosi dan Pemberdayaan Dunia Usaha.....	65

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Organisasi DPMPTSP Prov. Kaltim.....	06
Gambar 2.1	Keterkaitan Visi, Misi Tujuan, Sasaran Gubernur Pada Program DPMPTSP Prov. Kaltim .....	14
Gambar 2.2	Target Kebutuhan Investasi 2014-2025 .....	19
Gambar 3.1	Peringkat Provinsi Kalimantan Timur di Level Nasional Pada Triwulan IV Tahun 2020 .....	35
Gambar 3.2	Peringkat Provinsi Kalimantan Timur di Level Nasional Bulan Januari – Desember Tahun 2020 .....	36
Gambar 3.3	Analisa Data Survey Indeks Kepuasan Masyarakat DPMPTSP Prov. Kaltim Periode Januari – Juni Tahun 2020.....	45
Gambar 3.4	Analisa Data Survey Indeks Kepuasan Masyarakat DPMPTSP Prov. Kaltim Periode Juli – Desember Tahun 2020 .....	51

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Dasar Pembentukan Organisasi**

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1973 tentang Pembentukan Lembaga Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 1973 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah, maka di Daerah dibentuklah Tim Pembantu Gubernur Urusan Penanaman Modal (TPGUPM), dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 35 Tahun 1974.

Selanjutnya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah, maka oleh Menteri Dalam Negeri telah dikeluarkan Surat Keputusan Nomor 139 Tahun 1981 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMMD), yang terakhir telah diubah dengan Surat Keputusan Nomor 30 Tahun 1989, dan selanjutnya oleh Gubernur telah dikeluarkan Surat Keputusan Nomor 317 Tahun 1989 Tentang Penyempurnaan Struktur Organisasi BKPMMD.

Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan di Daerah, maka telah dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 122 Tahun 1999 tentang Penyempurnaan Struktur Organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah, dan dalam rangka implementasi Otonomi Daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur membentuk suatu Badan sebagai Pengganti BKPMMD, yaitu Badan Promosi dan Investasi Daerah (BPID) dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah dan Reformasi di bidang Investasi, yang tugas pokoknya merupakan kelanjutan dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi BKPMMD sebelumnya yang dirangkum dalam bentuk penyelenggaraan pemerintahan Provinsi di bidang promosi dan investasi, yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 04 Tahun 2001 yang terakhir

diubah dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor 09 Tahun 2004 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2004.

Seiring dengan berjalannya reformasi di bidang otonomi daerah dan sebagai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur, serta Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 46 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur, maka dibentuklah organisasi Badan Perizinan dan Penanaman Modal (BPPMD) sebagai pengganti institusi BPID. Badan Perizinan dan Penanaman Modal Kaltim mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perizinan dan penanaman modal.

Sejalan dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu, khususnya pasal 10 ayat (3) yang menyatakan agar setiap daerah membentuk Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP), dengan tugas utama menyelenggarakan perizinan/non perizinan sesuai kewenangannya. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden dimaksud, Gubernur Kalimantan Timur melalui Plt. Sekretaris Daerah mencanangkan pelimpahan kewenangan pemrosesan dan penerbitan perizinan/non perizinan dari SKPD sektoral/teknis kepada BPPMD, dan pada saat itu dicanangkan pula pengalihan nama BPPMD menjadi BPMPTSP.

Kemudian berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota, Pemerintah Kalimantan Timur kemudian menindaklanjuti

dengan membuat Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur serta Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 65 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur maka DPMPTSP secara resmi digunakan dan diperkenalkan kepada publik.

Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang PTSP di bidang Penanaman Modal serta Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 34 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan PTSP di bidang Penanaman Modal, diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 17 Tahun 2011 kemudian digantikan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 48 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan fungsi sekaligus sebagai institusi penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal dan di bidang teknis/sektoral lainnya.

Penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal secara resmi diluncurkan pada tanggal 18 Maret 2011 oleh Kepala BKPM RI (Gita Wirjawan) dan Gubernur Kalimantan Timur (H. Awang Faroek Ishak), bersamaan dengan 7 PTSP Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur. Pelayanan Terpadu Satu Pintu menggunakan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) yang terintegrasi antara BKPM, Kementrian/LPNK, PDPPM (Perangkat Daerah Provinsi Bidang Penanaman Modal) dan PDKPM (Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Bidang Penanaman Modal).

Seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 17 Tahun 2011 yang digantikan dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 48 Tahun 2015, maka penyelenggaraan PTSP oleh DPMPTSP saat ini sudah secara efektif di bidang penanaman modal dan di bidang teknis/sektoral

lainnya, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja terkait Pelayanan Terpadu di Daerah, serta Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Perdagangan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kepala BKPM Nomor 69 Tahun 2009, Nomor 09 Tahun 2008. AH.01.01.2009, Nomor 69/M-DAG/PER/12/2009, Nomor PER.30/MEN/XII/2009, Nomor 10 Tahun 2009 tentang Percepatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Untuk Memulai Usaha.

## **B. Tugas dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur bahwa Kepala DPMPTSP Prov. Kaltim mempunyai tugas membantu Gubernur *“Melaksanakan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Dibidang Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu”*, dan Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
2. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
4. Perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal;

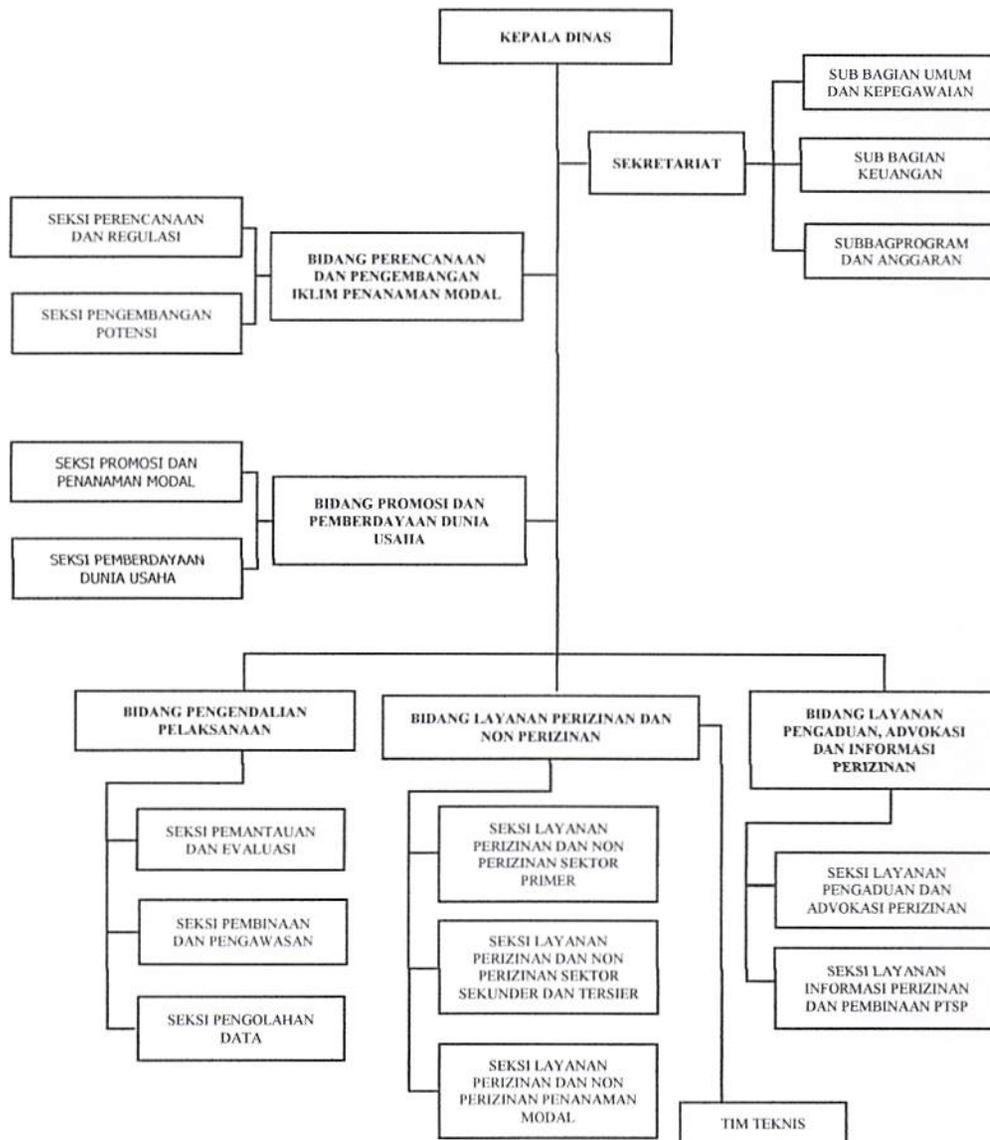
5. Perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis di bidang promosi penanaman modal;
6. Perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
7. Perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis di bidang layanan perizinan dan non perizinan penanaman modal;
8. Perumusan, perencanaan, pembinaan, dan pengendalian kebijakan teknis di bidang layanan pengaduan, advokasi, dan informasi perizinan;
9. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
10. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
11. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

### **C. Struktur Organisasi**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, serta Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur untuk melaksanakan amanat sebagaimana tersebut di atas, maka dijabarkan dan diuraikan tugas dan fungsi masing-masing seksi. Berikut bagan Struktur Organisasi DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur :



Gambar 1.1 Bagan Organisasi DPMPTSP Prov. Kaltim



#### D. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah merupakan unsur yang paling menentukan dalam proses pembangunan, khususnya Sumber Daya Aparatur yang merupakan mesin penggerak berjalannya roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Komposisi Pegawai Negeri Sipil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur sampai Desember 2020 sebanyak 39 orang, terdiri dari Pejabat Struktural Eselon II.A Kepala Dinas, 6 orang Pejabat Struktural Eselon III.A, 15 orang Pejabat Struktural Eselon IV.A dan 17 orang staf DPMPTSP Prov. Kaltim.

Tabel 1.1 Sumber Daya Aparatur DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur

No	Jabatan	Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan					
		Pria	Wanita	IV	III	II	I	Pasca sarjana	Sarjana	Diploma	SLTA	SLTP	SD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Kepala (Eselon 2)	1		1				1					
2	Sekretaris & Kabid (Eselon 3)	4	2	6				6	2				
3	Kasubbag & Kasi (Eselon 4)	9	6	5	10			3	5				
4	Pelaksana	10	7		13	3	1	2	19	4	5	1	1
		24	15	12	23	3	1	12	26	4	5	1	1
Jumlah PNS		24	15										39
Jumlah Non PNS		31	20										51
Jumlah PNS + Non PNS		55	35										90

Sumber : Form Pemutakhiran Data Pokok PNS & Laporan Daftar Pokok Kepegawaian Non PNS

### E. Aspek Strategis Organisasi

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, kemudian Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Timur 2005-2025 dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023, Program dan Kegiatan Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur diarahkan pada penguatan dan penajaman kegiatan yang langsung menyentuh pengembangan dan penggalian potensi investasi daerah, selektifitas sasaran promosi potensi, peningkatan pengendalian dan pengawasan terhadap eksistensi Perusahaan dan Peningkatan Pelayanan Perijinan melalui Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu.

Peningkatan pelayanan publik khususnya perizinan. Salah satu tugas pemerintah yang menjadi tuntutan masyarakat adalah terselenggaranya pelayanan publik yang baik. Perizinan merupakan salah satu wujud pelayanan publik yang sangat menonjol dalam tata pemerintahan. Dalam hubungan antara pemerintah dengan warga masyarakat seringkali perizinan menjadi indikator untuk menilai apakah suatu organisasi pemerintahan sudah

mencapai kondisi good governance atau belum. Tujuan kebijaksanaan tersebut adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta dapat memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau.

#### **F. Permasalahan Utama Isu Strategis**

Isu-isu permasalahan terdiri dari 2 bagian, yaitu identifikasi dan analisis kondisi internal dan eksternal. Kondisi internal memiliki 2 komponen, yaitu Kekuatan (*Strength*) dan Kelemahan (*Weakness*) sementara kondisi eksternal yaitu Peluang (*Opportunity*) dan Ancaman (*Treat*).

DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi tugas menarik investasi, maka komponen-komponen SWOT tersebut adalah :

1. Kekuatan (*Strength*)
  - a. Komitmen Pimpinan.
  - b. Adanya kelembagaan dan struktur organisasi..
  - c. Adanya pengawasan, Supervisi dan Monitoring Evaluasi (Monev)
  - d. Sarana dan prasarana yang menunjang dan memadai.
  - e. Sumber Daya Manusia yang kompeten
  - f. Diterapkannya OSS (*Online Single Submission*)
2. Kelemahan (*Weakness*)
  - a. Masih ada ketidaksinkronan antara RTRW Kaltim dengan RTRW Kabupaten/Kota.
  - b. Ketidakpastian peruntukan lahan.
  - c. Koordinasi antar lembaga terkait dalam penanaman modal belum optimal.
  - d. Infrastruktur dan utilitas terbatas.

### 3. Peluang (*Opportunity*)

- a. Perundangan dan peraturan yang terkait dengan penanaman modal dan perizinan.
- b. Keamanan daerah yang kondusif.
- c. Tersedianya kawasan industri.
- d. Tersedianya sumber daya alam.
- e. Iklim Usaha yang kondusif.
- f. Kerjasama Regional dan Internasional.
- g. Besarnya Investasi Pemerintah Daerah.
- h. Banyaknya Investor yang berminat berinvestasi di Kaltim.
- i. Upaya penyelarasan RT/RW Kalimantan Timur dengan Kabupaten/Kota.
- j. Pasar domestik dan pasar ekspor.

### 4. Ancaman (*Treat*)

- a. Melemahnya nilai rupiah terhadap dolar.
- b. Kemudahan penanaman modal di negara lain.
- c. Rendahnya tingkat pendidikan dan produktivitas tenaga kerja Indonesia serta tuntutan non normatif.
- d. Pasar bebas tenaga kerja (AFTA) dan perdagangan global.
- e. Capital Flight; Hambatan non tariff dalam system perdagangan global.
- f. Issue dampak kerusakan lingkungan.

Dalam upaya mendorong pertumbuhan investasi di Kalimantan Timur dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi Daerah, maka harmonisasi amanat RPJMD Provinsi Kalimantan Timur pada arah kebijakan Strategis I DPMPTSP Tahun 2019 – 2023 dengan 2 arah kebijakan, yaitu :

1. Pengembangan sistem perizinan yang terintegrasi berbasis teknologi informasi.
2. Peningkatan efektivitas pengendalian rencana investasi.

Hal tersebut telah diterjemahkan kedalam penguatan dan penajaman kegiatan yang lebih fokus, terarah dan konsisten yang tentunya harus ditopang dengan peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur menuju pada tahapan birokrasi yang semakin profesional dalam rangka pemberian pelayanan prima (service excellent) sesuai tuntutan dan perkembangan masyarakat dunia usaha, selektifitas terhadap promosi yang akan dilaksanakan, pengembangan potensi investasi yang profitable dan diminati pasar global, peningkatan pengawasan dan pembinaan terhadap Perusahaan yang sudah eksis, sehingga operasionalisasi dapat berjalan dengan baik serta penataan dan pembenahan kearah Pelaksanaan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang sudah mendapatkan legitimasi dengan keluarnya Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 17 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan demikian operasionalisasi PTSP dalam menarik investor telah dimulai dengan terealisasinya Pembentukan Tim Teknis. Rumusan tentang permasalahan pembangunan dan isu strategis merupakan bagian penting dalam penentuan kebijakan DPMPTSP dalam mendukung pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Timur lima tahun mendatang. Pemetaan permasalahan yang baik, menjadi dasar bagi perumusan intervensi yang komprehensif dari DPMPTSP. Dalam Pelaksanaan Program/Kegiatan DPMPTSP ada beberapa permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur :

1. Masalah pokok di bidang penanaman modal adalah belum optimalnya realisasi nilai investasi pada sektor sekunder dan tersier. ;
2. Kawasan strategis ekonomi provinsi Kalimantan Timur masih belum memberikan kontribusi yang signifikan ;
3. Walaupun Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang Penanaman Modal, sudah operasionalisasi dalam melaksanakan tugasnya sesuai Peraturan Gubernur

Kalimantan Timur Nomor 34 Tahun 2010 dan direvisi dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 17 tahun 2011 dan diubah menjadi Pergub No. 48 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, namun belum optimal layanan yang diberikan karena masih terbatasnya sarana PNS dan kinerja Tim Teknis ;

4. Belum terintegrasinya Promosi Investasi yang dilakukan, karena masih ada Kabupaten / Kota yang melakukan promosi secara sendiri, sehingga promosi atas nama Provinsi Kaltim yang dilakukan belum maksimal, untuk mengatasi masalah ini ;
5. Masih kurangnya ketersediaan informasi detail tentang peluang investasi, termasuk profil Komoditi yang ditawarkan belum dilengkapi dengan informasi yang rinci sehingga Calon Investor tidak memiliki informasi yang lengkap untuk mengambil sikap Bisnisnya ;
6. Status kepemilikan lahan yang akhir-akhir ini mengemuka di beberapa kasus, merupakan salah satu pertimbangan Investor untuk, berinvestasi di Kalimantan Timur ;
7. Sarana dan Prasarana pendukung untuk kelancaran Investor, seperti jalan, pelabuhan Udara/Laut, pasokan Listrik, air, perhotelan, dan lain-lain sebarannya belum merata karena hanya terbatas pada daerah tertentu ;
8. Terbatasnya anggaran penyelenggaraan pemerintah di bidang penanaman modal ;
9. Tumpang tindih lahan antara :
  - a. Perusahaan tambang batubara
  - b. Perusahaan tambang batubara *versus* perusahaan perkebunan
  - c. Perusahaan perkebunan *versus* perusahaan perkebunan
  - d. Perusahaan tambang batubara atau galian C dan perusahaan perkebunan *versus* peruntukan/kepentingan lainnya.

10. Kewenangan perijinan yang dilimpahkan dari Kabupaten/Kota kepada Provinsi masih ada yang belum *clean and clear* ;
11. Belum meratanya dan belum kuatnya daya saing sumber daya manusia termasuk terbatasnya ketersediaan tenaga kerja sesuai standar kebutuhan investasi ;
12. Kewenangan perijinan yang masih belum jelas pembagiannya ;
13. Masih ada pelayanan perijinan selain di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) ;
14. Layanan Online Single Submission (OSS) belum maksimal termasuk masih terbatasnya pengetahuan tentang penerapan OSS bagi perusahaan maupun investor ;
15. Lambannya transformasi ekonomi menuju pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan.

#### **G. Sarana dan Prasarana Kerja**

Untuk operasionalisasi Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang secara kuantitas dan kualitas akan diupayakan untuk terus ditingkatkan agar dapat menjamin kualitas pelayanan yang diberikan kepada calon investor.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur menempati ruang kerja di lahan seluas 2.895 M2 di jalan Basuki Rahmat No. 56 Samarinda, gedung kantor ini telah dilengkapi dengan ruang pertemuan investor (Display Room). Sementara untuk sarana pendukung operasional Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur melalui pengadaan sampai dengan tahun 2020, secara umum dapat dilihat pada Tabel 2.1 Sarana dan Prasarana DPMPTSP Prov. Kaltim berikut ini :

Tabel 1.2 Sarana dan Prasarana DPMPTSP Prov. Kaltim

NO.	URAIAN	BANYAKNYA	SATUAN
1	2	3	4
1	Meja Rapat	29	Unit
2	Kursi Rapat	148	Unit
3	Lemari	104	Unit
4	Filling Kabinet	29	Unit
5	CCTV	1	Set
6	Mesin Fotocopy	2	Unit
7	Air Conditioner	43	Unit
8	Televisi	6	Unit
9	Faximili	1	Unit
10	Laptop	37	Unit
11	Printer	99	Unit
12	UPS	23	Unit
13	Scanner	7	Unit
14	Mesin Tik	7	Unit
15	Mik Wireless	4	Unit
16	Speaker	2	Unit
17	Subwofer	2	Unit
18	Keyboard	3	Unit
19	Equalizer	1	Unit
20	Hard Disk	4	Unit
21	Recorder	2	Unit
22	Infocus	1	Unit
23	Mesin Absensi	1	Unit
24	Tabung Pemadam Kebakaran	15	Unit
25	Hardisk Eksternal	4	Unit
26	Recorder	2	Unit
27	Sound Sistem	3	Unit
28	Monitor	8	Unit
29	Komputer	57	Unit
30	Kamera	2	Unit
31	Telepon	16	Unit
32	CPU	17	Unit
33	MIC	38	Unit
34	Sofa & Meja Tamu	9	Unit
35	Mesin Pengancur Kertas	2	Unit

Sumber : Rekapitulasi Pengadaan Barang Modal

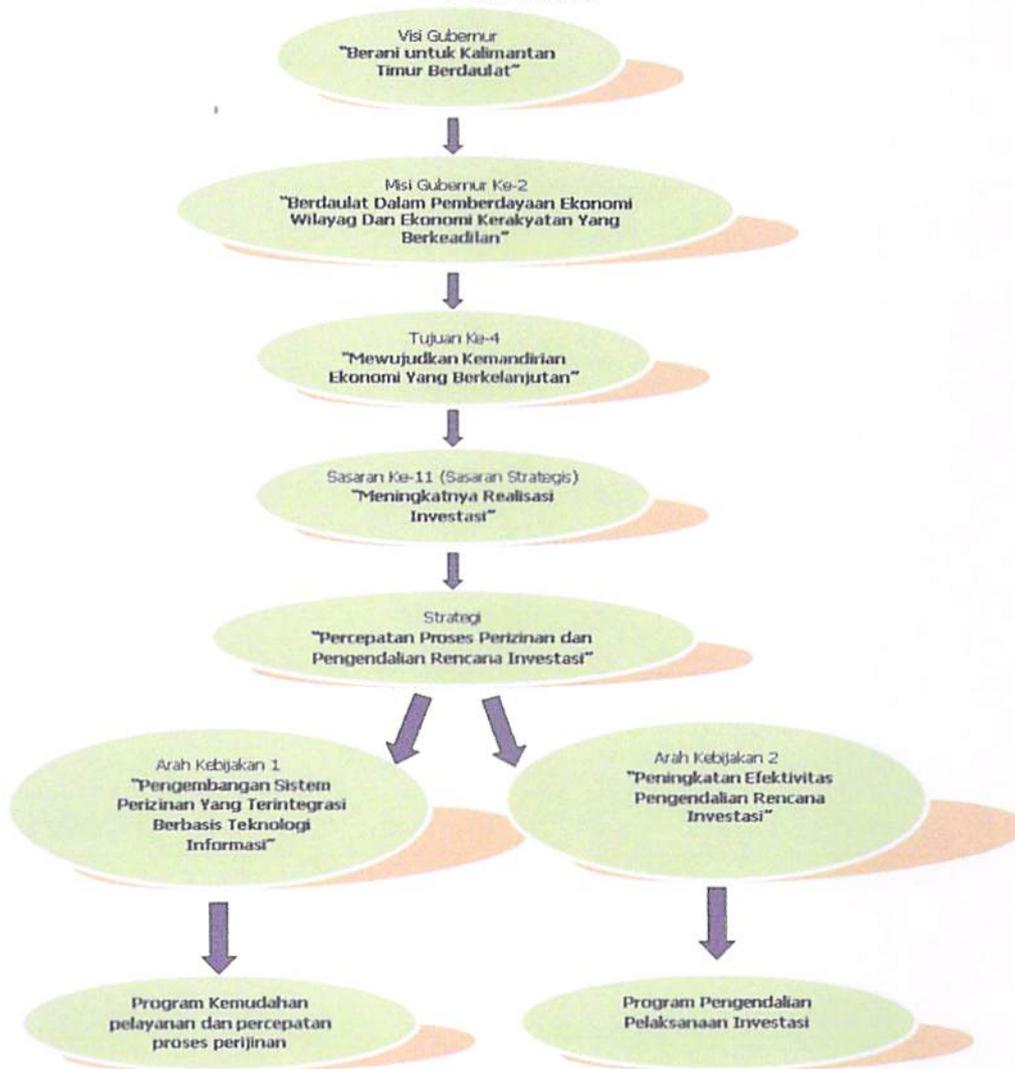
## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. Perencanaan Strategis

Tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur adalah *“Melaksanakan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Dibidang Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu”*, Sesuai Rencana Strategis DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019–2023 dan sejalan dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur.

Gambar 2.1 Keterkaitan Visi, Misi Tujuan, Sasaran Gubernur Pada Program DPMPTSP Prov. Kaltim



**Visi Gubernur dan Wakil  
Gubernur Prov. Kaltim  
2019 -2023**

**“Berani Untuk Kalimantan  
Timur Berdaulat”**

**Misi**

1. Berdaulat dalam pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan berdaya saing, terutama perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas.
2. Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan.
3. Berdaulat dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur kewilayahan.
4. Berdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
5. Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik.

**Tujuan DPMPTSP Dalam  
Mendukung Visi & Misi  
Gubernur dan Wakil Gubernur  
Prov. Kaltim 2019 – 2023**

1. Mewujudkan Peningkatan Aparatur Sipil Negara dan Sarana Prasarana Penunjang.
2. Mewujudkan Percepatan dan Kemudahan Pelayanan Perizinan.
3. Mewujudkan Pengendalian Pelaksanaan Investasi
4. Mewujudkan Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal yang Terintegrasi dan Implementasi di Kawasan Strategis.
5. Mewujudkan Pelayanan Advokasi dan Informasi Perizinan yang prima.
6. Menyelenggarakan Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal.

Tujuan yang ingin dicapai Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur dalam lima tahun kedepan didasarkan pada hasil identifikasi potensi, permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Gubernur Kalimantan Timur. Berdasarkan tugas dan fungsi DPMPTSP Prov. Kaltim dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No 09 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 65 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan

Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 22 Tahun 2014 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Timur 2014-2025, sesuai dengan salah satu sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 dalam salah satu Program Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 Dalam Rangka Pencapaian Visi dan Misi Gubernur yaitu **“Berani Untuk Kalimantan Timur Berdaulat”**

Berdasarkan tujuan tersebut diatas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur telah ditetapkan satu sasaran strategis yang telah diselaraskan dengan Visi, misi dan tujuan Kepala Daerah yang telah tertera didalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur dan RENSTRA 2019-2023 (Bab VI-Halaman 4), yaitu **“Meningkatnya Realisasi Investasi”**, sasaran strategis tersebut merupakan instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan. Perumusan sasaran tersebut diperlukan untuk memastikan kesesuaian intervensi pembangunan daerah. Pemaparan sasaran strategis dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Perencanaan Sasaran Strategis

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian s.d. Th. 2018	Target Kinerja Sasaran Tahun				
						2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Mewujudkan Kemandirian Ekonomi yang Berkelanjutan	Laju Pertumbuhan Ekonomi Non Migas dan Non Batubara	Meningkatnya Realisasi Investasi	Nilai Absolut/ Jumlah Nilai Investasi	Rp (Triliun)	25,53	31,5	33,08	31,38	32,32	33,29
			Nilai Indeks Survey Kepuasan Masyarakat	Skor	87,30	88	89	90	91	92

Sumber : Dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023

Tabel 2.2 Program / Kegiatan Untuk Mencapai Tujuan / Sasaran

N o.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
1	Mewujudkan Kemandirian Ekonomi yang Berkelanjutan	Meningkatnya Realisasi Investasi	Nilai Absolut/ Jumlah Nilai Investasi	Rp (Triliun)	Program Pengendalian Pelaksanaan Investasi	Penantauan dan evaluasi Penanaman Modal
						Penyusunan informasi penanaman modal
						Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Investasi
			Nilai Indeks Survey Kepuasan Masyarakat	Skor	Program Kemudahan pelayanan dan percepatan proses perijinan	Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan perizinan sektor primer
						Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan perizinan sektor sekunder dan tersier
						Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal
Penguatan Kelembagaan PTSP Kab/Kota						

Sumber : Dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023

### B. Indikator Kinerja Utama

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020 sesuai dengan Renstra, lihat tabel 2.3 :

Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan (Formulasi Perhitungan)	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Realisasi Investasi	Nilai Absolut/ Jumlah Nilai Investasi	Realisasi Investasi (33,08 Triliun)	Press Release BKPM	Kepala DPMPTSP Prov. Kaltim
		Nilai Indeks Survey Kepuasan Masyarakat	Realisasi Nilai Indeks Survey Kepuasan Masyarakat (IKM 89 Skor)	Survey	

Sumber : Dokumen Indikator Kinerja Utama Kepala DPMPTSP Tahun 2020

### C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan

akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan punishment atau sanksi, berikut tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Realisasi Investasi	Nilai Absolut/ Jumlah Nilai Investasi	Rp. Triliun	33,08
		Nilai Indeks Survey Kepuasan Masyarakat	Skor	89

Sumber : Dokumen Perjanjian Kinerja DPMPTSP Tahun 2020

### 1. Rencana Anggaran Tahun 2020

Pada tahun 2020 Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur, memperoleh alokasi anggaran setelah perubahan (APBD-P) sebesar Rp. 26.003.760.790,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp. 9.740.012.000 dan Belanja Langsung Rp 16.263.748.790,-. Adapun Realisasi anggaran sebesar Rp. Rp. 18.012.575.871, (69,27%) dengan rincian untuk belanja tidak langsung Rp. 6.467.860.935,- (66,41%) Belanja Langsung sebesar Rp. 11.544.741.936,- (70,99%).

### 2. Target Belanja DPMPTSP Prov. Kaltim Tahun 2020

Belanja Tidak Langsung merupakan anggaran belanja wajib mengikat atau dalam arti lain pembiayaan penggajian/ tunjangan seperti, pembayaran gaji pokok PNS, Tunjangan Keluarga, Jabatan, Iuran Asuransi Kesehatan, Biaya Insentif, pembiayaan Tunjangan Hari Raya dan pembiayaan tunjangan lainnya sedangkan Belanja Langsung merupakan anggaran yang dialokasikan untuk pembiayaan rutinitas perangkat daerah sampai biaya pelaksanaan kegiatan selama satu tahun. Berikut

target dan realisasi anggaran pada tahun 2020 dapat dilihat tabel 2.5.

Tabel 2.5 Target Belanja DPMPTSP Prov. Kaltim 2020

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2019		
		Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	%
1	Belanja Tidak Langsung	Rp. 9.740.012.000	Rp. 6.467.860.935	66,41
2	Belanja Langsung	Rp 16.263.748.790	Rp. 11.544.714.936	70,99
	Jumlah	Rp.26.003.760.790	Rp. 18.012.575.871	69,27

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Periode 31 Desember 2020

Di dalam pelaksanaan kegiatan diatas terdapat Target Realisasi Investasi Provinsi Kalimantan Timur dituangkan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan GubernurNo. 22 Tahun 2014 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014-2025 kemudian digambarkan dalam gambar dan grafik sebagai berikut :

Gambar 2.2 Target Kebutuhan Investasi 2014-2025

No.	Indikator	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,21	4,43	4,66	4,88	5,11	5,2	5,2	5,2
2	ICOR (%)	3,65	3,65	3,5	3,5	3,35	3,35	3,35	3,35
3	Tingkat deprenasi (%)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
4	Tingkat tabungan (%)	33,62	34,42	33,81	34,58	33,87	34,17	34,47	39,47
5	FDRB Konstan Tahun 2000 Dengan Migas (Rp Miliar)	125.122	128.051	133.732	139.963	146.802	154.301	162.016	1.030.137
6	Tingkat Inflasi (%)	5,55	5,45	5,35	5,25	5,15	5,00	5,00	5,00
7	Kebutuhan Investasi (Rp. Miliar)	60.017	63.511	67.561	71.882	76.495	81.425	86.695	116.777
8	Kapasitas Fisikal (Rp. Miliar)	15.644	16.426	17.247	18.110	19.015	19.966	20.964	26.205
	a. Belanja Modal Pemerintah Provinsi (Rp. Miliar)	1.809	1.899	1.994	2.094	2.199	2.309	2.424	3.030
	b. Belanja Modal Pemerintah Kab kota (Rp. Miliar)	13.835	14.527	15.253	16.016	16.817	17.657	18.540	23.175
9	Kesenjangan Investasi (Rp. Miliar)	44.373	47.085	50.314	53.772	57.480	61.459	65.731	90.572
10	Target Investasi Pemerintah (Rp. Miliar)	6.500	6.825	7.508	8.258	9.084	9.992	10.991	16.487
11	Target Investasi Swasta (Rp. Miliar)	35.000	37.100	39.330	41.690	44.190	46.840	49.650	66.450
12	Target Investasi Swasta PMDN (Rp. Miliar)	12.250	12.985	13.766	14.592	15.467	16.394	17.378	23.258
13	Target Investasi Swasta PMA (Rp. Miliar)	22.750	24.115	25.564	27.098	28.723	30.446	32.272	43.192
14	Kebutuhan Investasi Swasta Baru (Rp. Miliar)	2.873	3.160	3.476	3.824	4.206	4.627	5.090	7.635

### 3. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja langsung Tahun anggaran 2020 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6 Anggaran Belanja Langsung Per Sasaran Strategis

No.	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp.)	Persentase	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Realisasi Investasi	623.874.000	65,34%	Alokasi anggaran ini terdiri dari 2 <b>program prioritas</b> dan 7 kegiatan dapat dilihat pada Tabel

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa adanya program prioritas, yang dimana perumusan program prioritas dibahas pada forum Rencana Awal Kerja Pembangunan Daerah (Ranwal RKPD) Provinsi Kalimantan Timur, khususnya untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, telah dirancang bahwa untuk rencana kerja program prioritas terdiri dari 2 (dua) program yaitu Program **Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal** dan **Program Pelayanan Penanaman Modal**. Pada program tersebut bertujuan untuk membangun dan mengembangkan kawasan-kawasan industri/ perusahaan yang bernilai meningkatkan investasi di Kalimantan Timur, yang fokus utamanya dikawasan Kariangau dan Balikpapan sekitarnya.

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi Sistem AKIP Tahun Sebelumnya

##### 1. Nilai Hasil Akuntabilitas Kinerja

Tabel 3.1 Tabel Nilai Hasil AKIP

No	Komponen yang Dinilai	Bobot (%) 2019	Nilai 2018	Nilai 2019	Peningkatan/ Penurunan Capaian
1	Percanaan Kinerja	30	14,92	17,04	+ 2,12
2	Pengukuran Kinerja	25	8,44	10,63	+ 2,19
3	Pelaporan Kinerja	15	6,56	8,68	+ 2,12
4	Evaluasi Internal	10	2,13	3,91	+ 1,78
5	Pencapaian Sasaran/ Kinerja Organisasi	20	10,63	10,56	- 0,07
	<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>	<b>100</b>	<b>42,68</b>	<b>50,82</b>	<b>+ 8,14</b>
	<b>Kategori Penilaian</b>		<b>Kurang "C"</b>	<b>Cukup "CC"</b>	

Sumber : Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi Sistem AKIP Tahun 2019

Hasil evaluasi atas implementasi Sistem AKIP pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 memperoleh nilai sebesar **50,82** (lima puluh koma delapan dua) atau dengan predikat penilaian **"CC"** (**Cukup/Memadai**).

##### 1. Tindak Lanjut Atas Hasil Evaluasi Inspektorat Provinsi terhadap Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP

Tabel 3.2 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Inspektorat Provinsi

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut
<b>I</b>	<b>Perencanaan Kinerja</b>	
1.	Perencanaan strategis a. Pemenuhan Renstra lebih ditingkatkan antara lain : - Tujuan agar dilengkapi dengan indikator keberhasilan. - Tujuan disertai dengan target berhasilan. - Renstra agar telah menyajikan IKU. - Renstra agar di publikasikan ke dalam website.	- Melakukan review pada dokumen Renstra DPMPSTSP Kaltim dengan memperhatikan tujuan dan menyajikan IKU. - Publikasikan Renstra melalui website DPMPSTSP Kaltim telah dilaksanakan.

	<p>b. Kualitas Renstra</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tujuan belum sepenuhnya berorientasi hasil.</li> <li>- Ukuran keberhasilan (indikator) tujuan (outcome) belum memenuhi kriteria ukuran keberhasilan yang baik.</li> <li>- Sasaran belum sepenuhnya berorientasi hasil.</li> <li>- Indikator kinerja sasaran (outcome dan output) belum memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik.</li> <li>- Target kinerja agar ditetapkan dengan baik yaitu menggambarkan suatu tingkatan tertentu yang seharusnya dicapai (termasuk tingkatan yang standar, generally accepted), selaras dengan RPJMN/RPJMD/Renstra, berdasarkan (relevan dgn) indikator yang SMART, berdasarkan basis data yang memadai dan berdasarkan argumen dan perhitungan yang logis.</li> <li>- Program/ kegiatan agar merupakan cara untuk mencapai tujuan / sasaran / hasil program / hasil kegiatan.</li> <li>- Dokumen Renstra agar selaras dengan dokumen RPJMD.</li> <li>- Dokumen Renstra agar menetapkan hal – hal yang seharusnya ditetapkan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan peningkatan kualitas dokumen Renstra DPMPTSP Kaltim khususnya outcome dan output pada tujuan, sasaran serta indikator kinerja.</li> <li>- Penetapan target kinerja telah terukur untuk memudahkan dalam mengevaluasi kinerja.</li> <li>- Pelaksanaan perencanaan program/ kegiatan mengacu Dokumen Renstra yang diselaraskan dengan dokumen RPJMD Prov. Kaltim.</li> </ul>
	<p>c. Implementasi Renstra agar lebih ditingkatkan lagi antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumentasi Renstra agar digunakan sebagai acuan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran.</li> <li>- Target jangka menengah dalam Renstra agar di monitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan paling tidak terdapat dokumentasi hasil monitoring / capaian kinerja jangka menengah dilaporkan progressnya dalam laporan kinerja dan terdapat tindak lanjut atas hasil monitoring.</li> <li>- Dokumen Renstra agar direview secara berkala.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumen rencana kerja dan anggaran telah mengacu pada dokumen Renstra DPMPTSP Kaltim.</li> <li>- Secara berkala akan mereview dokumen Renstra.</li> </ul>
<p>2.</p>	<p>Perencanaan Kinerja Tahunan</p> <p>a. Pemenuhan PKT agar lebih ditingkatkan yaitu Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) agar menyajikan IKU.</p> <p>b. Kualitas PKT agar ditingkatkan lagi antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sasaran berorientasi hasil (outcome).</li> <li>- Indikator kinerja sasaran dan hasil</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumen PK dan IKU telah di dokumentasikan dalam bentuk laporan.</li> <li>- Mereview kembali dokumen PK khususnya outcome pada indikator kinerja dan hasil program.</li> <li>- Rencana Kinerja Tahunan diupayakan</li> </ul>



	<p>pengumpulan data kinerja yang up to date.</p> <p>2. Kualitas pengukuran lebih ditingkatkan lagi antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- IKU cukup untuk mengukur kinerja.</li> <li>- IKU unit kerja selaras dengan IKU IP.</li> <li>- Ukuran (indikator) kinerja individu mengacu pada IKU unit kerja organisasi / atasannya.</li> <li>- Pengukuran kinerja dilakukan secara berjenjang dengan kriteria indikator – indikator yang sudah SMART dan cukup.</li> <li>- Pengumpulan data kinerja agar dapat diandalkan, yaitu data yang dikumpulkan didasarkan mekanisme memadai atau terstruktur (jelas mekanisme pengumpulan datanya, siapa yang mengumpulkan data, mencatat dan siapa yang mensupervisi, serta sumber data valid).</li> <li>- Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi agar dilakukan secara berkala (bulanan/ triwulan/ semester).</li> <li>- Pengukuran kinerja agar dikembangkan menggunakan teknologi informasi.</li> </ul>	<p>data yang up to date serta berpedoman pada SOP.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan IKU telah dilaksanakan dan akan menyelaraskan dengan IKU IP, Melihat dokumen RPJMD dan Renstra DPMPTSP selaras pada saat review renstra terakhir.</li> <li>- Ukuran kinerja individu mengacu pada IKU unit kerja atau atasan, mereview kembali dokumen IKI.</li> <li>- Sumber data telah diarsipkan dan di dokumentasikan</li> <li>- Laporan rencana aksi dilakukan secara berkala dan terdokumentasi dalam bentuk laporan.</li> <li>- Menyajikan pengukuran kinerja melalui Website DPMPTSP Kaltim.</li> </ul>
	<p>3. Implementasi pengukuran agar ditingkatkan lagi, antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- IKU agar dimanfaatkan dalam dokumen – dokumen perencanaan dan penganggaran.</li> <li>- IKU agar dimanfaatkan untuk penilaian kinerja.</li> <li>- Target kinerja eselon III dan IV agar dimonitor pencapaiannya.</li> <li>- Hasil pengukuran capaian kinerja mulai dari tingkat eselon IV keatas dimanfaatkan sebagai dasar pemberian reward dan punishment.</li> <li>- Melakukan review terhadap IKU secara berkala.</li> <li>- Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi agar digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyajikan IKU dalam dokumen perencanaan dan penganggaran serta penilaian kinerja.</li> <li>- Dilakukan monitoring terhadap pencapaian kinerja Eselon III dan IV, kemudian hasil pengukuran dimaksud akan dikomunikasikan kepada Kepala Dinas untuk menjadi dasar pemberian reward dan punishment.</li> <li>- Mereview IKU secara berkala.</li> <li>- Laporan rencana aksi dilaksanakan secara berkala dan terdokumentasi dalam bentuk laporan.</li> </ul>
<b>III</b>	<b>Pelaporan Kinerja</b>	
	<p>1. Pemenuhan pelaporan agar lebih ditingkatkan lagi, antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan kinerja agar di upload ke dalam website.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Segera menyajikan laporan kinerja di website DPMPTSP Kaltim.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan kinerja agar menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU dan IKU yang disajikan mengacu kepada kriteria IKU yang baik yaitu SMART dan menggambarkan kinerja utama yang seharusnya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyajikan informasi pencapaian IKU pada laporan kinerja.</li> </ul>
2.	<p>Penyajian informasi kinerja agar lebih ditingkatkan lagi, antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Informasi yang disajikan dalam bentuk laporan kinerja agar menggambarkan hasil – hasil (termasuk output-output penting) yang telah dicapai dan seharusnya tercapai sampai dengan saat ini bukan informasi tentang realisasi seluruh anggaran yang telah digunakan dan penyajian informasi kinerja harus didasarkan pada data yang dapat diandalkan.</li> <li>- Laporan kinerja agar menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan.</li> <li>- Laporan kinerja agar menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya.</li> <li>- Laporan kinerja agar menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi.</li> <li>- Informasi kinerja dalam laporan kinerja agar dapat diandalkan, yaitu data harus valid, dapat ditelusuri kesumber datanya, diperoleh dari sumber yang kompeten, dapat diverifikasi dan konsisten.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyajikan indikator kinerja yang dianggap penting serta data – data yang dapat diandalkan.</li> <li>- Akan dimuat laporan kinerja perbandingan data antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya.</li> <li>- Akan menyajikan informasi analisis efisiensi penggunaan sumber daya serta informasi keuangan terkait pencapaian sasaran kinerja instansi pada laporan kinerja.</li> <li>- Secara internal telah dilakukan pengukuran kinerja dengan mengumpulkan data – data yang valid, dari sumber tersebut akan dilakukan verifikasi secara kompeten.</li> </ul>
3.	<p>Pemanfaatan informasi kinerja agar lebih ditingkatkan lagi, antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan kinerja yang disusun samapai saat ini agar berdampak kepada perbaikan perencanaan, baik perencanaan jangka menengah, tahunan maupun dalam penetapan atau perjanjian kinerja yang disusun.</li> <li>- Informasi yang disajikan dalam laporan kinerja agar digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dalam kegiatan organisasi.</li> <li>- Informasi yang disajikan agar digunakan untuk peningkatan kinerja yaitu terdapat bukti yang cukup bahwa informasi dalam laporan kinerja (termasuk laporan kinerja tahunan sebelumnya) telah digunakan untuk perbaikan capaian kinerja organisasi yang lebih baik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan kinerja akan di lakukan evaluasi secara berkala, guna perbandingan data untuk rencana tahun sebelumnya dan rencana tahun kedepan sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan.</li> <li>- Akan menerapkan informasi pada laporan kinerja sebagai dasar capaian peningkatan kinerja organisasi yang lebih baik kedepannya.</li> <li>- Pemberian reward dan punishment capaian kinerja pada laporan kinerja akan segera di komunikasi kepada Kepala Dinas.</li> </ul>

	<p>periode berikutnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Informasi capaian kinerja yang disajikan dalam laporan kinerja agar dijadikan dasar untuk menilai dan menyimpulkan kinerja serta dijadikan dasar reward dan punishment.</li> </ul>	
<b>IV. Evaluasi Internal</b>		
1.	<p>Pemenuhan Evaluasi agar lebih ditingkatkan lagi, antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi secara periodik minimal triwulan.</li> <li>- Menyampaikan hasil evaluasi atau dibahas dengan pihak yang dievaluasi (yang berkepentingan) dan terjadi kesepakatan dengan pihak yang terkait langsung dengan temuan hasil evaluasi untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan rencana aksi telah dilaksanakan dalam bentuk laporan dan akan dilakukan secara periodik.</li> <li>- Melakukan evaluasi kepada pihak yang berkepentingan guna menindaklanjuti hasil rekomendasi evaluasi dimaksud.</li> </ul>
2.	<p>Kualitas Evaluasi agar lebih ditingkatkan lagi, antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Evaluasi program agar dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan program.</li> <li>- Evaluasi program agar disertai rekomendasi yang terkait dengan perencanaan kinerja dan rekomendasi tersebut telah disetujui untuk dilaksanakan.</li> <li>- Melakukan pemantauan Rencana Aksi secara bulanan dalam rangka mengendalikan kinerja.</li> <li>- Meningkatkan kualitas pemantauan Rencana Aksi dan menggunakan hasil pemantauan rencana aksi tersebut untuk memberikan alternative perbaikan kinerja.</li> <li>- Hasil evaluasi Rencana Aksi agar menunjukkan perbaikan setiap periode.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hasil evaluasi program akan disajikan pada laporan kinerja.</li> <li>- Akan dilakukan review pada program kegiatan untuk perencanaan kinerja yang lebih baik dari tahun sebelumnya.</li> <li>- Akan dilakukan evaluasi rencana aksi secara berkala dan setiap periode .</li> </ul>
3.	<p>Pemanfaatan Evaluasi agar lebih ditingkatkan lagi, antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hasil evaluasi program agar ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang.</li> <li>- Hasil evaluasi Rencana Aksi agar ditindaklanjuti dalam bentuk langkah – langkah nyata.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hasil evaluasi program akan disajikan pada laporan kinerja.</li> <li>- Rencana aksi yang telah disusun dilakukan secara efektif sebagai dasar pemantauan dan pengendalian kinerja.</li> </ul>
<b>V. Pencapaian Sasaran/ Kinerja Organisasi</b>		
	<p>Dalam pencapaian kinerja output maupun outcome agar lebih ditingkatkan lagi serta perbaikan informasi dapat diandalkan.</p>	<p>Informasi pelaporan kinerja dan anggaran secara berkala kepada masing – masing pejabat Eselon DPMPTSP Kaltim.</p>

Sumber : Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi Sistem AKIP Tahun 2020 dan Hasil Money Kasubbag Perencanaan Program DPMPTSP Prov. Kaltim

## B. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi

Tabel 3.3 Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya Realisasi Investasi	Nilai Absolut/ Jumlah Nilai Investasi	Rp (Triliun)	33,08	Triwulan I	8.270.000.000.000	4.641.440.340.000	14,03
					Triwulan II	8.270.000.000.000	7.434.087.840.000	22,47
					Triwulan III	8.270.000.000.000	23.150.150.900.000	69,98
					Triwulan IV	8.270.000.000.000	8.227.449.580.000	24,87
		Nilai Indeks Survey Kepuasan Masyarakat	Skor	89	Triwulan I	-	-	
					Triwulan II	-	-	
					Triwulan III	-	-	
					Triwulan IV	89	86,96	97,70

Sumber : Press release realisasi investasi triwulan IV 2020 dan hasil survey kepuasan masyarakat

### REALISASI INVESTASI

#### 1. REALISASI INVESTASI PMDN

Target realisasi investasi tahun 2020 ditetapkan oleh RPJMD sebesar **33,08 Triliun**, Pada Triwulan IV (Oktober - Desember) tahun 2020 ini tercatat realisasi investasi mencapai angka **Rp 8,23 Triliun**, dengan rincian realisasi **PMDN** sebesar **Rp7,30 Triliun** (1.666 proyek) dan realisasi **PMA** sebesar **US\$. 64,66 Juta** atau sebesar **Rp 931,33 Miliar** (227 proyek). Capaian realisasi investasi pada Triwulan IV 2020 sebesar **Rp 8,23 Triliun** mengalami penurunan sebesar **26,44%** dibandingkan Triwulan IV 2019 sebesar **Rp 10,40 Triliun**. Capaian realisasi investasi pada Triwulan I sampai dengan Triwulan IV (Januari – Desember) tahun 2020 sebesar **Rp 31,38 Triliun** mengalami penurunan sebesar **11,90%** dibandingkan tahun 2019 yang sebesar **Rp 35,62 Triliun**. Tahun 2020 realisasi investasi sebesar **Rp 31,38 Triliun** atau **147,31%** dari target realisasi investasi tahun 2020 **Rp 33,08 Triliun**.

## A. Realisasi Investasi PMDN dan PMA Januari – Desember Tahun 2020

### 1. Realisasi Investasi PMDN

#### 1.1. Realisasi Investasi Berdasarkan Lokasi

Realisasi PMDN pada tahun 2020 mencapai **Rp 25,93 Triliun**, dengan jumlah proyek sebanyak 3.924; dimana berdasarkan sebaran lokasinya seluruh Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur mendapatkan tambahan realisasi investasi.

Realisasi Investasi paling besar berada di Kota Balikpapan, yaitu mencapai Rp 13,85 Triliun atau 53,40% dari keseluruhan realisasi investasi PMDN. Realisasi Investasi terbesar kedua sebesar Rp 3,62 Triliun atau 13,94% dari keseluruhan realisasi investasi PMDN di Kabupaten Berau, dan Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi kontributor terbesar ketiga yaitu mencapai Rp 2,29 Triliun atau 8,81%

Penyerapan tenaga kerja Indonesia, Kota Balikpapan paling tinggi sebanyak 6.269 orang (31,42% dari total tenaga kerja Indonesia) dan jumlah tenaga kerja asing sebanyak 53 orang (67,95% dari total tenaga kerja asing), kemudian disusul Kabupaten Kutai Timur sebanyak 4.065 orang (20,37% dari total tenaga kerja Indonesia), dan Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 3.674 orang (18,41% dari total tenaga kerja Indonesia), dengan tenaga kerja asing sebanyak 9 orang (11,54% dari total tenaga kerja asing). Total penyerapan tenaga kerja (Indonesia dan Asing) selama periode Januari – Desember 2020 sebanyak 20.030 orang.

Tabel 3.4 Realisasi Investasi PMDN Berdasarkan Sebaran Lokasi di Kalimantan Timur Periode Januari – Desember 2020

NO	KABUPATEN / KOTA	REALISASI			
		PROYEK	INVESTASI (Rp)	TENAGA KERJA	
				TKI	TKA
1	Balikpapan	1.027	13.849.409.800.000	6.269	53
2	Berau	249	3.615.380.500.000	1.811	6
3	Kutai Kartanegara	466	2.284.878.700.000	3.674	9
4	Kutai barat	156	1.897.214.300.000	121	-
5	Kutai Timur	533	1.317.579.200.000	4.065	-
6	Bontang	367	881.443.000.000	726	-
7	Samarinda	822	659.902.800.000	1.409	2
8	Mahakam hulu	20	508.160.000.000	11	-

NO	KABUPATEN / KOTA	REALISASI			
		PROYEK	INVESTASI (Rp)	TENAGA KERJA	
				TKI	TKA
9	Penajam Paser Utara	114	487.048.200.000	850	-
10	Paser	170	432.992.300.000	1.016	8
<b>TOTAL</b>		<b>3.924</b>	<b>25.934.008.800.000</b>	<b>19.952</b>	<b>78</b>

Sumber: Diolah dari data BKPM RI, DPMPSTP Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kaltim

## 1.2. Realisasi Investasi Berdasarkan Sektor Usaha

Jika dilihat berdasarkan sektor usaha maka realisasi investasi PMDN yang dicapai pada tahun 2020 menunjukkan subsektor Industri Kimia Dasar, Barang Kimia dan Farmasi mengalami penambahan investasi terbesar yaitu mencapai Rp 7,97 Triliun dan memberikan kontribusi terhadap realisasi investasi seluruh sektor usaha yaitu sebesar 30,71%. Subsektor Konstruksi berada di urutan kedua kontributor terbesar yaitu mencapai Rp 5,78 Triliun atau 22,28%. Sedangkan subsektor Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan sebagai kontributor ketiga mencapai Rp 4,74 Triliun atau 18,27%.

Secara keseluruhan terdapat sekitar 21 subsektor usaha yang berkontribusi terhadap nilai realisasi investasi PMDN pada tahun 2020.

Dari sisi penyerapan tenaga kerja, terdistribusi pada subsektor Pertambangan yang menyerap tenaga kerja Indonesia paling banyak yaitu 5.010 orang atau 25,11% dari total jumlah tenaga kerja Indonesia, dan subsektor ini juga menyerap tenaga kerja asing sebanyak 18 orang atau 23,08% dari total seluruh tenaga kerja asing yang terserap. Sektor selanjutnya adalah subsektor Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan yaitu 3.151 orang atau 15,79% dari total tenaga kerja Indonesia, dan subsektor ini juga menyerap tenaga kerja asing sebanyak 2 orang atau 2,56% dari total seluruh tenaga kerja asing yang terserap. Sektor selanjutnya adalah subsektor Industri Kimia Dasar, Barang Kimia dan Farmasi yaitu 3.060 orang atau 15,34% dari total tenaga kerja Indonesia, dan subsektor ini juga menyerap tenaga kerja asing sebanyak 49 orang atau 62,82% dari total seluruh tenaga kerja asing yang terserap.

Tabel 3.5 Realisasi Investasi PMDN Berdasarkan Sektor Usaha di Kalimantan Timur Periode Januari – Desember 2020

NO	SEKTOR USAHA	REALISASI			
		PROYEK	INVESTASI (Rp)	TENAGA KERJA	
				TKI	TKA
<b>I</b>	<b>SEKTOR PRIMER</b>				
1	Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan	466	4.738.083.600.000	3.151	2
2	Kehutanan	52	125.549.600.000	1.396	1
3	Perikanan	3	3.000.000	-	-
4	Pertambangan	384	3.818.587.600.000	5.010	18
<b>II</b>	<b>SEKTOR SEKUNDER</b>				
1	Industri Makanan	171	1.397.339.400.000	866	2
2	Industri Tekstil	-	-	-	-
3	Industri Barang dari Kulit & Alas Kaki	-	-	-	-
4	Industri Kayu	38	97.509.900.000	95	-
5	Industri Kertas, Barang Kertas & Percetakan	9	-	-	-
6	Industri Kimia Dasar, Barang Kimia & Farmasi	70	7.965.221.900.000	3.060	49
7	Industri Karet, Barang dari Karet & Plastik	8	70.800.000	-	-
8	Industri Mineral Non Logam	15	95.000.000	-	-
9	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Mesin & elektronik	10	5.000.000.000	-	-
10	Industri Instrumen Kedokteran, Presisi, Optik & Jam	4	-	-	-
11	Industri Alat Angkutan & Transportasi lainnya	37	3.626.300.000	105	-
12	Industri Lainnya	30	70.348.600.000	46	-
<b>III</b>	<b>SEKTOR TERSIER</b>				
1	Listrik, Gas dan Air	68	759.122.700.000	482	-
2	Konstruksi	350	5.777.776.900.000	468	-
3	Perdagangan & Reparasi	1.267	218.379.900.000	1.129	-
4	Hotel & Restoran	149	25.157.000.000	233	-
5	Transportasi, Gudang & Komunikasi	267	459.299.200.000	2.483	4
6	Perumahan, Kawasan Industri & Perkantoran	65	53.687.400.000	9	-
7	Jasa Lainnya	461	419.150.000.000	1.419	2
<b>TOTAL</b>		<b>3.924</b>	<b>25.934.008.800.000</b>	<b>19.952</b>	<b>78</b>

Sumber: Diolah dari data BKPM RI, DPMPTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kaltim

## 2. Realisasi Investasi PMA

### 2.1. Realisasi Investasi Berdasarkan Lokasi

Realisasi PMA pada Tahun 2020 mencapai US\$ 378,03 Juta atau sebesar **Rp 5,44 Triliun**, dengan sebaran yang ada di 10 Kabupaten/Kota. Kabupaten Kutai Timur memberikan kontribusi paling signifikan dengan nilai US\$. 117,65 Juta atau sebesar Rp 1,69 Triliun (31,12% dari total realisasi PMA), terdiri atas 113 proyek PMA. Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi kontributor kedua yaitu mencapai US\$ 63,19 Juta atau sebesar Rp 909,94 Miliar (16,72% dari total realisasi PMA),

atas 135 proyek PMA. Sedangkan Kota Bontang merupakan kontributor ketiga yaitu sebesar US\$. 55,61 Juta atau sebesar Rp 800,83 Miliar (14,71%), atas 12 proyek PMA. Persentase kontribusi Kabupaten/Kota lainnya berkisar 9,55% hingga 1,55%.

Dari sisi penyerapan tenaga kerja Indonesia paling besar terdapat di Kabupaten Kutai Timur yaitu sebanyak 2.867 orang dan tenaga kerja asing sebanyak 52 orang, kemudian Kabupaten Kutai Kartanegara dengan tenaga kerja Indonesia sebanyak 965 orang dan tenaga kerja asing sebanyak 20 orang, disusul Kota Samarinda dengan tenaga kerja Indonesia sebanyak 813 orang dan tenaga kerja asing sebanyak 13 orang.

Tabel 3.6 Realisasi Investasi PMA Berdasarkan Lokasi di Kalimantan Timur  
Periode Januari – Desember 2020

NO	KABUPATEN / KOTA	REALISASI			
		PROYEK	INVESTASI (US\$)	TENAGA KERJA	
				TKI	TKA
1	Kutai Timur	113	117.645.700	2.867	52
2	Kutai Kartanegara	135	63.190.100	965	20
3	Bontang	12	55.613.300	18	-
4	Kutai barat	67	37.063.600	309	4
5	Balikpapan	214	36.093.800	754	3
6	Samarinda	82	18.803.700	813	13
7	Berau	87	16.223.300	59	-
8	Paser	30	16.069.900	15	-
9	Mahakam hulu	16	11.453.800	38	-
10	Penajam Paser Utara	22	5.870.000	30	-
<b>TOTAL</b>		<b>778</b>	<b>378.027.200</b>	<b>5.868</b>	<b>92</b>

Sumber: Diolah dari data BKPM RI, DPMPTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kaltim

• Kurs US\$ terhadap Rp : 1 US\$ = Rp 14.400,-

## 2.2. Realisasi Investasi Berdasarkan Sektor Usaha

Realisasi PMA berdasarkan sektor usaha, subsektor Pertambangan mendapatkan tambahan realisasi investasi terbesar yaitu US\$ 167,86 Juta (Rp2,41 Triliun) atau sebesar 44,40% dari keseluruhan realisasi PMA. Subsektor lain yang juga memberikan kontribusi cukup besar untuk realisasi investasi di wilayah ini adalah Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan yaitu sebesar US\$ 67,78 Juta

(Rp976,05 Miliar) atau 17,93% dan subsektor Industri Makanan sebesar US\$. 41,23 Juta (Rp593,79 Miliar) atau 10,91%. Secara keseluruhan terdapat sekitar 19 subsektor usaha yang berkontribusi terhadap nilai realisasi investasi PMA pada tahun 2020.

Dari sisi penyerapan tenaga kerja, terdistribusi pada subsektor Tanaman Pangan dan Perkebunan yang menyerap tenaga kerja Indonesia paling banyak yaitu 3.594 orang atau 61,25% dari total jumlah tenaga kerja Indonesia yang terserap melalui tambahan realisasi investasi PMA. Pada subsektor ini juga menyerap tenaga kerja asing sebanyak 5 orang atau 5,43% dan dari seluruh tenaga kerja asing yang terserap. Selanjutnya subsektor Perdagangan dan Reparasi menyerap tenaga kerja Indonesia sebanyak 690 orang atau 11,76% dan dari seluruh tenaga kerja asing yang terserap sebanyak 4 orang atau 4,35% tenaga kerja asing pada subsektor ini. Sektor lain yang juga menyerap tenaga kerja Indonesia adalah subsektor Transportasi, Gudang dan Komunikasi dengan serapan tenaga kerja Indonesia sebanyak 589 orang atau mencapai 10,04% dari total jumlah tenaga kerja Indonesia.

Tabel 3.7 Realisasi Investasi PMA Berdasarkan Sektor Usaha di Kalimantan Timur Periode Januari – Desember 2020

NO	SEKTOR USAHA	REALISASI			
		PROYEK	INVESTASI (US\$)	TENAGA KERJA	
				TKI	TKA
<b>I</b>	<b>SEKTOR PRIMER</b>				
1	Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan	181	67.781.500	3.594	5
2	Kehutanan	17	2.071.400	32	-
3	Perikanan	-	-	-	-
4	Pertambangan	163	167.858.400	301	34
<b>II</b>	<b>SEKTOR SEKUNDER</b>				
1	Industri Makanan	114	41.235.500	381	5
2	Industri Tekstil	-	-	-	-
3	Industri Barang dari Kulit & Alas Kaki	-	-	-	-
4	Industri Kayu	1	-	-	-
5	Industri Kertas, Barang Kertas & Percetakan	-	-	-	-
6	Industri Kimia Dasar, Barang Kimia & Farmasi	17	32.861.600	137	6
7	Industri Karet, Barang dari Karet & Plastik	10	986.400	4	-
8	Industri Mineral Non Logam	7	24.840.000	21	32

NO	SEKTOR USAHA	REALISASI			
		PROYEK	INVESTASI (US\$)	TENAGA KERJA	
				TKI	TKA
9	Industri Logam Dasar, brg. Logm, Msn & Elektronik	14	276.400	9	-
10	Industri Instrumen Kedokteran, Presisi, Optik & Jam	12	3.550.700	7	-
11	Industri Alat Angkutan & Transportasi lainnya	7	-	12	-
12	Industri Lainnya	1	-	-	-
<b>III</b>	<b>SEKTOR TERSIER</b>				
1	Listrik, Gas dan Air	9	278.800	18	-
2	Konstruksi	10	-	-	-
3	Perdagangan & Reparasi	97	5.618.500	690	4
4	Hotel & Restoran	31	791.000	9	-
5	Transportasi, Gudang & Komunikasi	29	29.415.000	589	-
6	Perumahan, Kawasan Industri & Perkantoran	8	221.300	8	-
7	Jasa Lainnya	50	240.700	56	6
<b>TOTAL</b>		<b>778</b>	<b>378.027.200</b>	<b>5.868</b>	<b>92</b>

Sumber: Diolah dari data BKPM RI, DPMPSTP Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kaltim

• Kurs US\$ terhadap Rp : 1 US\$ = Rp 14.400,-

Sumber : Diolah dari data BKPM RI

### 3. Kumulatif Realisasi Investasi PMDN dan PMA Januari – Desember 2020 Tahun 2020

Berdasarkan angka realisasi investasi yang telah dijelaskan di atas, dapat dikumulatikan pada Tahun 2020 (Januari – Desember), realisasi PMDN dan PMA di Kalimantan Timur mencapai angka Rp 31,38 Triliun, terdiri atas PMDN sebesar Rp 25,93 Triliun atau 82,65% dari total realisasi investasi, dengan 3.924 proyek dan PMA sebesar Rp 5,44 Triliun atau 17,35% dari total realisasi investasi, dengan 778 proyek. Jika dikomparasikan dengan target realisasi investasi pada tahun 2020 telah mencapai angka 147,31%, dengan total proyek sebanyak 4.702 paket. Total tenaga kerja yang terserap untuk PMDN sebanyak 20.030 orang atau 77,07% yang terdiri dari tenaga kerja Indonesia sebanyak 19.952 orang dan tenaga kerja asing yang sebanyak 78 orang. Total tenaga kerja yang terserap untuk PMA sebanyak 5.960 orang atau 22,93% yang terdiri dari tenaga kerja Indonesia sebanyak 5.868 orang dan tenaga kerja asing yang sebanyak 92 orang.

Tabel 3.8 Realisasi Investasi PMDN dan PMA di Kalimantan Timur Periode Januari – Desember 2020

No	Investasi	Realisasi Investasi Triwulan IV	Jumlah Proyek (Paket)	Jumlah Tenaga Kerja (orang)
1	PMDN (Rp)	25.934.008.800.000	3.924	20.030
2	PMA			
	2.1. Dinilai dalam US\$	378.027.200		
	2.2. Dinilai dalam Rp *)	5.443.591.680.000	778	5.960
<b>TOTAL (dalam Rp) = 1 + 2.2</b>		<b>31.377.600.480.000</b>	<b>4.702</b>	<b>25.990</b>

Keterangan : \*) Dikonversikan pada kurs Rp 14.400,-/US\$

Sumber: Diolah dari data BKPM RI, DPMPTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kaltim

## a. Peringkat Realisasi Investasi Provinsi Kalimantan Timur Pada Level Nasional

### 1. Triwulan IV Tahun 2020

Pada level nasional realisasi investasi PMDN pada Triwulan IV tahun ini menempati *urutan ke-6*, setelah Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Sedangkan untuk PMA berada di *urutan ke-17*, setelah Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Sumatera Selatan, Banten, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, Riau, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, Papua, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat.

Gambar 3.1 Peringkat Provinsi Kalimantan Timur di Level Nasional pada Triwulan IV Tahun 2020

PMDN				PMA			
NO	LOKASI	INVESTASI (Rp Miliar)	PROYEK	NO	LOKASI	INVESTASI (US\$ Juta)	PROYEK
1	Jawa Barat	16.008,7	3.608	1	Jawa Barat	1.256,8	3.020
2	Daerah Khusus Ibukota Jakarta	9.261,0	6.816	2	Daerah Khusus Ibukota Jakarta	917,7	5.615
3	Banten	8.896,0	2.127	3	Sumatera Selatan	882,6	170
4	Jawa Timur	8.267,3	5.903	4	Banten	770,6	1.109
5	Jawa Tengah	7.812,1	3.037	5	Maluku Utara	655,8	56
6	Kalimantan Timur	7.296,1	1.666	6	Sulawesi Tengah	545,8	111
7	Riau	7.222,4	1.093	7	Riau	460,3	235
8	Sumatera Selatan	6.865,8	618	8	Kepulauan Riau	375,5	620
9	Sumatera Utara	4.886,1	1.531	9	Jawa Tengah	340,4	774
10	Kepulauan Riau	3.521,1	740	10	Jawa Timur	249,0	1.027
11	Sulawesi Selatan	2.639,5	596	11	Sulawesi Tenggara	234,2	38
12	Kalimantan Barat	2.553,6	688	12	Papua	206,9	82
13	Papua	2.410,1	119	13	Kalimantan Barat	175,1	236
14	Aceh	1.814,8	617	14	Sumatera Utara	113,5	448
15	Kalimantan Selatan	1.467,8	534	15	Sulawesi Selatan	90,0	137
16	Sumatera Barat	1.465,7	407	16	Nusa Tenggara Barat	67,2	610
17	Bengkulu	1.179,6	170	17	Kalimantan Timur	64,7	227
18	Papua Barat	1.132,4	132	18	Sulawesi Utara	62,0	70
19	Nusa Tenggara Barat	1.128,1	436	19	Kalimantan Tengah	40,3	148
20	Sulawesi Tengah	1.068,4	275	20	Bali	35,1	1.120

Sumber : BKPM, 2020

## 2. Bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2020

Di level nasional realisasi investasi PMDN pada bulan Januari – Desember 2020 menempati *urutan ke-7*, setelah Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, DKI Jakarta, Riau, Banten dan Jawa Tengah. Sedangkan untuk PMA berada di *urutan ke-16*, setelah Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Maluku Utara, Banten, Sulawesi Tengah, Kepulauan Riau, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Sulawesi Tenggara, Riau, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Papua dan Lampung.

Gambar 3.2 Peringkat Provinsi Kalimantan Timur di Level Nasional Bulan Januari – Desember Tahun 2020

PMDN				PMA			
NO	LOKASI	INVESTASI (Rp Miliar)	PROYEK	NO	LOKASI	INVESTASI (US\$ Juta)	PROYEK
1	Jawa Timur	55.660,6	15.562	1	Jawa Barat	4.793,7	11.031
2	Jawa Barat	51.400,5	8.989	2	Daerah Khusus Ibukota Jakarta	3.613,3	16.787
3	Daerah Khusus Ibukota Jakarta	42.954,7	17.667	3	Maluku Utara	2.409,0	182
4	Riau	34.117,8	3.382	4	Banten	2.143,6	4.288
5	Banten	31.145,7	5.833	5	Sulawesi Tengah	1.779,0	388
6	Jawa Tengah	30.606,1	8.628	6	Kepulauan Riau	1.649,4	2.143
7	Kalimantan Timur	25.934,0	3.823	7	Jawa Timur	1.575,5	4.059
8	Sumatera Utara	18.189,5	4.220	8	Sumatera Selatan	1.543,9	662
9	Sumatera Selatan	15.824,5	2.103	9	Jawa Tengah	1.363,6	2.795
10	Kepulauan Riau	14.249,0	2.224	10	Sulawesi Tenggara	1.268,6	145
11	Kalimantan Barat	9.256,5	2.074	11	Riau	1.078,0	823
12	Sulawesi Selatan	9.142,0	1.919	12	Sumatera Utara	974,8	1.465
13	Aceh	8.241,1	1.830	13	Kalimantan Barat	759,3	805
14	Lampung	7.120,5	1.271	14	Papua	567,7	184
15	Nusa Tenggara Barat	6.582,4	1.200	15	Lampung	498,4	384
16	Bali	5.432,7	2.513	16	Kalimantan Timur	378,0	722
17	Bengkulu	5.399,2	476	17	Nusa Tenggara Barat	302,1	1.776
18	Sulawesi Tengah	5.261,3	812	18	Bali	293,3	3.967
19	Kalimantan Selatan	4.286,3	1.620	19	Kalimantan Selatan	240,8	309
20	Kalimantan Tengah	3.710,0	976	20	Sulawesi Selatan	236,1	467

Sumber : BKPM, 2020

#### 4. Izin yang Diterbitkan DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur

Total perizinan sektoral pada periode Januari sampai dengan Desember tahun 2020 yang diterbitkan DPMPTSP Provinsi Kaltim sebanyak 1.102 izin. Izin usaha terbanyak yaitu sektor Pertambangan yaitu sebanyak 382 izin atau 34,66% dari total izin yang diterbitkan. Disusul sektor Perhubungan sebanyak 369 izin atau 33,48% dan sektor Perikanan dan Kelautan sebanyak 95 izin atau 8,62%.

Tabel 3.9 Rekapitulasi Perizinan Sektorial Periode Januari-Desember 2020

No	SEKTOR	BULAN												TOTAL/ SEKTOR
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	
<b>A PRIMER</b>														
1	Pertambangan	79	13	47	36	46	4	35	16	34	15	20	37	382
2	Kehutanan	18	4	3	4	4	5	4	4	4	5	6		61
3	Perkebunan	28	4	7	7	0	10	1	1		-	1		59
	<b>SUB TOTAL</b>	<b>125</b>	<b>21</b>	<b>57</b>	<b>47</b>	<b>50</b>	<b>19</b>	<b>40</b>	<b>21</b>	<b>38</b>	<b>20</b>	<b>27</b>	<b>37</b>	<b>502</b>
<b>B SEKUNDER &amp; TERSIER</b>														
1	Peternakan	10	4	9	8	5	-	-	-	-	-	-	-	36
2	Sosial	-	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	4
3	Perhubungan	176	31	89	50	18	4	-	-	-	1			369
4	Perikanan & Kelautan	38	18	38	1	-	-	-	-	-	-	-	-	95
5	Naker & Trans	16	7	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25
6	Komunikasi & Informatika	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Kesehatan	11	2	6	3	2	-	-	-	-	-	-	-	24
8	Perindagkop UKM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Lingkungan Hidup	7	1	7	5	6	1	3	3	4	1	1	8	47
10	Pariwisata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Pekerjaan Umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Pertanahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>SUB TOTAL</b>	<b>258</b>	<b>64</b>	<b>151</b>	<b>68</b>	<b>33</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>600</b>
	<b>Jumlah/Bulan</b>	<b>383</b>	<b>85</b>	<b>208</b>	<b>115</b>	<b>83</b>	<b>24</b>	<b>43</b>	<b>24</b>	<b>42</b>	<b>22</b>	<b>28</b>	<b>45</b>	<b>1.102</b>
	<b>Total</b>													<b>1.102</b>

Sumber : DPMPTSP Provinsi Kaltim, 2020

## 5. Izin Yang Diterbitkan Melalui Sistem Online Single Submission (OSS)

Berdasarkan Sistem Online Single Submission (OSS), total Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan melalui OSS di Provinsi Kalimantan Timur dari bulan Januari sampai Desember 2020 sebanyak **6.781 NIB**.

### C. Analisis Capaian Kinerja

Sesuai laporan Perjanjian Kinerja (PK) dan Indikator Kinerja (IKU) yang tertuang pada dokumen RENSTRA DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023 yang telah juga diselaraskan dengan dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Timur periode 2019-2023 maka DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur hanya memiliki satu sasaran yaitu **“Meningkatnya Realisasi Investasi”**. Dengan sasaran capaian program tersebut maka dapat dijabarkan capaian sasaran untuk membandingkan target dan realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja dengan tahun sebelumnya sebagai berikut :

#### 1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Tabel 3.10 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1	Nilai Absolut/ Jumlah Nilai Investasi	Rp (Triliun)	33,08	31,38	105,42%
2	Nilai Indeks Survey Kepuasan Masyarakat	Skor	89	86,96	97,71%

Sumber : *Press release realisasi investasi triwulan IV Tahun 2019 dan hasil survey kepuasan masyarakat Periode s/d Desember*

Dari tabel diatas dapat dilihat dari indikator kinerja Nilai Absolut/ Jumlah Nilai Investasi memiliki target Rp. 33,08 Triliun dengan realisasi Rp. 31,38 Triliun (105,42%). Pada indikator kinerja Nilai Indeks Survey Kepuasan Masyarakat memiliki target 89 Skor dengan realisasi 86,96 Skor (97,71%).

#### 2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Tabel 3.11 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun (n dan n-1)

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		% Peningkatan /Penurunan
			2019	2020	Tahun 2019
1	2	3	4	5	6 (5-4/4*100%)
1	Nilai Absolut/ Jumlah Nilai Investasi	Rp (Triliun)	33,81	31,38	-10,01%
2	Nilai Indeks Survey Kepuasan Masyarakat	Skor	86,79	86,96	0,2%

Sumber : *Press release realisasi investasi triwulan IV Tahun 2020 dan hasil survey kepuasan masyarakat Periode s/d Desember*

Dari tabel 3.11 dapat dilihat pada indikator kinerja Nilai Absolut/ Jumlah Nilai Investasi pada tahun 2019 realisasi mencapai Rp. 34,87 Triliun dan mengalami penurunan pada tahun 2020 adalah sebesar Rp. 31,38 Triliun (-10,01%), Pada indikator kinerja Nilai Indeks Survey Kepuasan Masyarakat pada tahun 2019 realisasi mencapai 86,79 dan mengalami penurunan pada tahun 2020 adalah sebesar 86,96 skor (0,2%).

### 3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Tabel 3.12 Realisasi Kinerja dan Target Akhir RPJMD/ RENSTRA

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD/ RENSTRA	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1	Nilai Absolut/ Jumlah Nilai Investasi	Rp (Triliun)	33,08	31,38	94,86%
2	Nilai Indeks Survey Kepuasan Masyarakat	Skor	89	86,96	97,71%

Sumber : Dokumen RPJMD Prov Kaltim, Press release realisasi investasi triwulan IV Tahun 2019 dan hasil survey kepuasan masyarakat Periode s/d Desember

Dari tabel diatas dapat dilihat pada indikator kinerja Nilai Absolut/ Jumlah Nilai Investasi memiliki target akhir RPJMD/RENSTRA sebesar Rp. 33,08 Triliun dengan realisasi Rp. 31,38 Triliun dan memiliki penurunan 94,86%. Pada indikator kinerja Nilai Indeks Survey Kepuasan Masyarakat memiliki target akhir RPJMD/RENSTRA sebesar 98 Skor dengan realisasi 86,96 Skor dan memiliki penurunan 97,71% karena pada tahun ini mengalami penurunan yang terjadi karena dampak pandemi covid 19.

### 4. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

#### - Keberhasilan Kinerja

- a) Dikarenakan adanya dukungan dari pengalokasian anggaran yang tercukupi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
- b) Kegiatan guna peningkatan realisasi investasi dilakukan dengan cara

pembinaan, pengawasan dan dievaluasi terhadap perusahaan-perusahaan yang telah terbit izinnya serta dilaksanakan dengan kerjasama yang baik antara Tim Internal DPMPTSP Prov. Kaltim, Perusahaan dan Instansi yang terkait.

- c) Melakukan pendataan dan pengolahan data secara up to date dengan cara membangun sistem informasi yang berbasis online dengan melakukan kegiatan sosialisasi pengisian sistem informasi LKPM Online per triwulan terhadap perusahaan serta melaksana sosialisasi pedoman tata cara pengendalian pelaksanaan modal dengan Kab/ Kota.
- Penurunan Kinerja
- d) Dikarenakan adanya pelimpahan penandatanganan proses Perizinan dan Non Perizinan yang bukan lagi ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur, maka hal tersebut mengakibatkan terhambatnya proses permohonan izin, sehingga dampak dari kasus diatas menyebabkan penurunan penilaian/ skor survey kepuasan masyarakat dibanding dengan tahun lalu
  - e) Walaupun Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang Penanaman Modal, sudah operasionalisasi dalam melaksanakan tugasnya sesuai Pergub Kalimantan Timur Nomor 34 Tahun 2010 dan direvisi dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 17 tahun 2011 dan diubah menjadi Pergub No. 30 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, namun belum optimal layanan yang diberikan karena masih terbatasnya sarana PNS dan kinerja Tim Teknis.
  - f) Status kepemilikan lahan yang akhir-akhir ini mengemuka di beberapa kasus, merupakan salah satu pertimbangan Investor untuk, berinvestasi

di Kalimantan Timur.

- Alternatif solusi

- g) Solusi pada butir (d) dapatantisipasi dengan 2 (dua) cara yaitu :
1. Merevisi kembali pergub tentang pelimpahan pendatanganan proses perizinan dan non perizinan seperti sedia kala, yaitu setiap proses penandatanganan dan penerbitan izin kembali ke Kepala DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur.
  2. Atau perlu direvisi kembali Standart Operational Procedure (SOP) pada kegiatan proses pendaftaran izin sampai dengan penerbitan izin maupun non izin.

Melihat kedua solusi diatas yang kami simpulkan dan telah kami analisa solusi pada poin (1) ke-satu adalah cara terbaik karena dalam melihat pelaksanaan penerbitan yang berjalan ini kurang efektif dan efisien serta terlalu banyak memakan waktu karena proses pendatanganan secara bertahap seperti kelengkapan dokumen dan berjenjang sampai dengan Gubernur, dan apabila pelimpahan proses perizinan kembali kepada Kepala DPMPTSP akan memudahkan proses perizinan karena proses tersebut hanya berakhir kepada Kepala Dinas.

- h) Solusi pada butir (e) adalah Perlu adanya penambahan tenaga PNS yang menguasai bidangnya khususnya di Bidang Pelayanan Perizinan
- i) Solusi pada butir (f) DPMPTSP Prov. Kaltim terus membangun komunikasi dan koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional Provinsi maupun Kabupaten/Kota tentang Tata Ruang dan Peruntukan Lahan

## 5. Analisis Program/ Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur, memiliki tantangan dan peluang dalam peningkatan realisasi investasi di Kalimantan Timur dan Pelayanan Perizinan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memiliki komitmen kuat dalam melaksanakan reformasi birokrasi terutama dalam pelayanan perizinan terpadu, dan dengan telah disahkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan Pemerintah Provinsi dalam melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah Provinsi menjadi bertambah. Hal tersebut menjadi tantangan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Namun tantangan yang ada tersebut tidaklah menjadi penghambat dalam melaksanakan pelayanan dasar yaitu pelayanan masyarakat dibidang penanaman modal dan perizinan, namun hal tersebut justru harus dapat dijadikan pemicu untuk memberikan pelayanan yang lebih baik. Berikut analisis yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan sasaran strategis yang telah dimuat pada laporan Perjanjian Kinerja :

### a) Hasil Analisa Pada Indikator Peningkatan Realisasi Investasi

- Tantangan ke depan yang harus dihadapi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam meningkatkan realisasi investasi sangatlah berat mengingat banyak faktor yang akan mempengaruhi terhadap pencapaian realisasi investasi di Kalimantan Timur. Salah satu faktor yang mungkin akan menghambat pencapaian realisasi investasi di Kalimantan Timur adalah berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Selain itu negara-negara pesaing di ASEAN seperti Vietnam memiliki kebijakan di bidang investasi yang lebih menarik bagi investor sehingga menjadi ancaman dalam

pencapaian realisasi investasi di Kalimantan Timur. Selain negara lain, persaingan juga terjadi dengan provinsi lain yang ada di Indonesia, hal ini bisa kita lihat dengan meningkatnya realisasi investasi di beberapa Provinsi terutama di luar Jawa yang memiliki sumber daya alam yang cukup banyak.

- Selain hal tersebut di atas tantangan yang harus dihadapi adalah masih kurang kondusifnya masalah perburuhan di Kalimantan Timur ditandai dengan adanya demo buruh setiap penetapan UMR yang mengakibatkan henggangnya beberapa perusahaan di Kalimantan Timur ke daerah lain dan ke luar negeri. Hal ini tentu harus diantisipasi agar tidak semakin banyak perusahaan yang henggang dari Kalimantan Timur ke daerah lain.
- Sementara untuk pelayanan perijinan tantangan yang dihadapi DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur dalam memberikan pelayanan perijinan kepada masyarakat dihadapkan dengan tingginya ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilaksanakan pemerintah, mereka menuntut pelayanan publik/perizinan yang cepat dan bebas biaya. Tuntutan masyarakat ini wajar mengingat paradigma pelayanan publik pada saat sekarang ini memang menuntut pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang bebas biaya serta waktu penyelesaian yang cepat.

b) Hasil Analisa Pada Indikator Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan Periode Januari – Juni 2020

Secara keseluruhan *INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT / PELANGGAN* adalah sebesar **86,45%** turun sebesar **0,34 %** dari hasil survey periode sebelumnya yang berada pada **86,79%**. Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan Indeks kepuasan pelanggan terhadap produk/layanan maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Kaltim tergolong “SANGAT MEMUASKAN / SANGAT BAIK”.

Angka Indeks Kepuasan pelanggan ini adalah presentase hasil dari perbandingan antara total nilai kepuasan (realita yang dirasakan pelanggan) terhadap total nilai kepuasan pada skala tertinggi (Sangat memuaskan) yang menggambarkan sejauh mana gap / kesenjangan yang terjadi atas posisi level kepuasan yang dirasakan pelanggan terhadap standar tertinggi yang semestinya bisa diberikan oleh maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Kaltim.

Untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat telah dilakukan pengisian kuesioner dalam bentuk multiple choice dengan 4 (empat) kategori dari “a” hingga “d” (a: sangat baik, b: Baik, c: kurang baik, d: tidak baik) dan telah diterima hasilnya dalam bentuk kuesioner yang telah dijawab atau pernyataan lain secara tertulis dari masyarakat. Untuk lebih memudahkan dalam mengukur tingkat kepuasan masyarakat, maka masing-masing kategori memiliki nilai yang berbeda. Untuk a = 4, b = 3, c = 2, d = 1.

Pelanggan / masyarakat yang telah menerima kuesioner survey indeks kepuasan masyarakat secara langsung selama enam bulan sekali (periode Januari - Juni Tahun 2020) sebanyak 92 responden. Dari ke 150 responden tersebut dapat dianalisa hasilnya secara lengkap sebagai berikut :

Gambar 3.3 Analisa Data Survey Indeks Kepuasan Masyarakat DPMPTSP Prov. Kaltim  
Periode Januari – Juni Tahun 2020

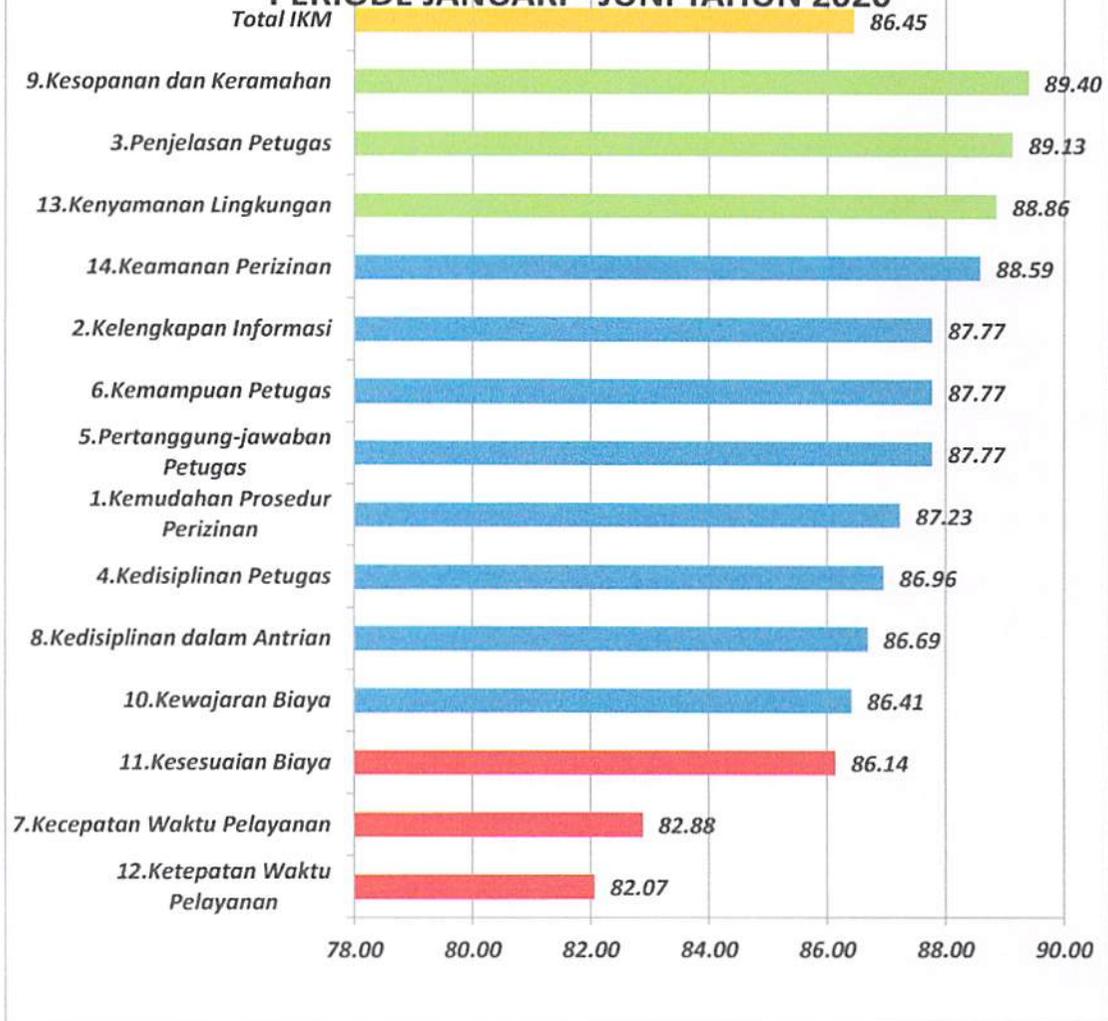
**ANALISA DATA**  
**SURVEY INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT**  
**DINAS PMPTSP PROV. KALTIM PERIODE JANUARI - JUNI TAHUN 2020**

INDIKATOR	KATEGORI	JAWABAN	NILAI	NILAI X JAWABAN	NILAI PER UNSUR	JUMLAH NILAI PER UNSUR	NRR PER UNSUR X 0,071	NILAI IKM (%) PER UNSUR
1. Kemudahan Prosedur Perizinan	A	48	4	192	321	3,49	0,248	87,228
	B	41	3	123				
	C	3	2	6				
	D	0	1	0				
2. Kelengkapan Informasi	A	50	4	200	323	3,51	0,249	87,772
	B	39	3	117				
	C	3	2	6				
	D	0	1	0				
3. Penjelasan Petugas	A	53	4	212	328	3,57	0,253	89,130
	B	38	3	114				
	C	1	2	2				
	D	0	1	0				
4. Kedisiplinan Petugas	A	45	4	180	320	3,48	0,247	86,957
	B	46	3	138				
	C	1	2	2				
	D	0	1	0				
5. Pertanggung-jawaban Petugas	A	48	4	192	323	3,51	0,249	87,772
	B	43	3	129				
	C	1	2	2				
	D	0	1	0				
6. Kemampuan Petugas	A	49	4	196	323	3,51	0,249	87,772
	B	41	3	123				
	C	2	2	4				
	D	0	1	0				
7. Kecepatan Waktu Pelayanan	A	45	4	180	305	3,32	0,235	82,880
	B	38	3	108				
	C	6	2	12				
	D	5	1	5				
8. Kedisiplinan dalam Antrian	A	46	4	184	319	3,47	0,246	86,685
	B	44	3	132				
	C	1	2	2				
	D	1	1	1				
9. Kesopanan dan Keramahan	A	53	4	212	329	3,58	0,254	89,402
	B	39	3	117				
	C	0	2	0				
	D	0	1	0				
10. Kewajaran Biaya	A	45	4	180	318	3,46	0,245	86,413
	B	44	3	132				
	C	3	2	6				
	D	0	1	0				
11. Kesesuaian Biaya	A	45	4	180	317	3,45	0,245	86,141
	B	43	3	129				
	C	4	2	8				
	D	0	1	0				
12. Ketepatan Waktu Pelayanan	A	42	4	168	302	3,28	0,233	82,065
	B	37	3	111				
	C	10	2	20				
	D	3	1	3				
13. Kenyamanan Lingkungan	A	52	4	208	327	3,55	0,252	88,859
	B	39	3	117				
	C	1	2	2				
	D	0	1	0				
14. Keamanan Perizinan	A	51	4	204	326	3,54	0,252	88,587
	B	40	3	120				
	C	1	2	2				
	D	0	1	0				
<b>Nilai IKM Total</b>							<b>3,458</b>	<b>86,45</b>

## INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT / PELANGGAN (IKM)

DINAS PMPTSP PROV. KALTIM

PERIODE JANUARI - JUNI TAHUN 2020



Tiga Variabel dengan *Tingkat Kepuasan pelanggan tertinggi* adalah :

- Kesopanan dan Keramahan sebesar 89,40% (Sangat Memuaskan / Sangat Baik)
- Penjelasan Petugas sebesar 89,13% (Sangat Memuaskan / Sangat Baik)
- Kenyamanan Lingkungan sebesar 88,86% (Sangat Memuaskan / Sangat Baik)

Sementara tiga variabel dengan *Tingkat Kepuasan Pelanggan terendah* adalah :

- Ketepatan Waktu sebesar 82,07% (Sangat Memuaskan / Sangat Baik)
- Kecepatan Waktu sebesar 82,88% (Sangat Memuaskan / Sangat Baik)
- Kesesuaian Biaya sebesar 86,14% (Sangat Memuaskan / Sangat Baik)

***Komentar / Saran Pelanggan untuk Peningkatan***

Beberapa komentar dan saran dari pelanggan dalam rangka peningkatan jasa dan pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PINTU Prov. Kalimantan pada periode Januari - Juni Tahun 2020 ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.13 Pelanggan (Responden) Periode Januari – Juli 2020

NO	PELANGGAN (RESPONDEN)	KOMENTAR/MASUKAN/SARAN
1.	ROHANI	<p>AGAR SURAT IZIN YANG DIKELUARKAN WAKTU PENYELESAIANYA TIDAK TERLALU LAMA</p> <p>SEBELUM ADA PERUBAHAN PENERBITAN IZIN, PTSP MENGELUARKAN IZIN SESUAI JANGKA WAKTU NAMUN SETELAH ADA PERUBAHAN PENERBITAN IZIN SANGAT LAMBAT</p>
2.	ACHMAD MULYAN	<p>TERHADAP PRIZINAN DENGAN PROYEK PEMERINTAH KHUSUS KEGIATAN HULU MIGAS MOHON DIBANTU ADANYA STANDAR BATAS WAKTU HARI PELAYANAN PERIZINAN AKAN SGERA DISELESAIKAN SUPAYA TIDAK TERTUNDA TERLALU LAMA</p>
3.	PERTAMINA HULU MAHAKAM,PT	<p>PROSEDUR PENGJUAN PROSES PERIZINAN SUDAH BERJALAN DENGAN BAIK, SEJAK PENERIMAAN BERKAS AMPAI DENGAN TERBITNYA SURAT IZIN, LINGKUNGAN YANG BAIK DAN BERSIH, PETUGAS YANG RAMAH SEMOGA BISA DI PERTAHANKAN BAHKAN DITINGKATKAN LEBIH BAIK LAGI, SUCCES DPMPTSP PROVINSI KALTIM</p>
4.	BORNEO KARVA PERSADA, PT	<p>AGAR SGERA DIHUBUNGI APABILA PERIZINAN TELAH SELESAI</p>
6.	HERLINA	<p>PERLU PEMBEWAHAN DALAM PROSES PELAYANAN PERIZINAN YANG TERLALU LAMA</p>
7.	TELEN, PT	<p>KIRANYA BIROKRASI PENERBITAN IZIN DAPAT DIPERSINGKAT</p>
8.	SHAFRUN ALIM	<p>SEMOGA LEBIH MAJU LAGI</p>

Sumber : Laporan Hasil Analisa Pengukuran Kepuasan Pelanggan (Periode Juli-Desember 2020)

9.	SOLIHIN	AGAR SK NYA CUKUP DPMPTSP AJA YANG MENANDATANGANNYA KEPALA DINASNYA SAJA AGAR BIROKRASI TIDAK TERLALU PANJANG
10.	HUSNI THAMRIN	PELAYANAN SUDAH OK PERLU PERTAHANKAN ATAU PERLU DITINGKATKAN LAGI
11.	ACHMAD BASITH	DAPAT DIPERCEPAT LAGI UNTUK PROSES PENERBITAN IZIN DIKARENAKAN BELAKANGAN INI CUKUP LAMA BERKAS PERIZINANNYA TERBIT DIBANDINGKAN TAHUN TAHUN SEBELUMNYA YANG JAUH LEBIH CEPAT DALAM PENERBITAN IZIN
12.	SINAR MANDIRI SEMPURNA	PELAYANAN SUDAH BAGUS DAN MUDAH DIMENGERTI
13.	MUSLIMIN	PELAYANAN LEBIH DITINGKATKAN
14.	GALUH SETYAWAN	LAHAN PARKIR MOBIL UNTUK DAPAT DIPERLUAS
15.	PT. AMBAR BORNEO	TINGKATKAN TERUS PELAYANAN DENGAN KERAMAHAN
16.	PT. MENARA BANDAR SAMUDERA	SANGAT MEMUASAKAN PELAYANAN
17.	SENES	TINGKATKAN PELAYANAN TERHADAP MASYARAKAT
18.	FAULI RAHMADIANSYAH	BIROKRASI YANG TERLALU LAMA
19.	REZNALDI	PERCEPAT PROSES IZIN KAPAL
20.	H2 NURUL HUDA	SEMUYANYA SUDAH BAIK, DIPERTAHANKAN DAN MOHON BISA LEBIH DITINGKATKAN LAGI
21.	LAODE RAHAMA	KAMI JADI SATU PIHAK YANG KURANG DAPAT LAYANAN MAKSIMAL KARENA INTERNAL; DINAS MOHON KEDEPAN JANGAN ADA KONDISI SEPERTI INI

### ***Kesimpulan :***

Dari hasil pengolahan data dan analisa (tingkat kepuasan - realisasi pelayanan, tingkat kepentingan - harapan pelayanan, indeks kepuasan dan diagram kartesius) terhadap lembar kuesioner pengukuran kepuasan pelanggan terhadap produk dan pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Kaltim periode Januari - Juni Tahun 2020 diperoleh beberapa point kesimpulan sebagai berikut :

1. Secara keseluruhan ***INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT / PELANGGAN*** adalah sebesar **86,45%** menurun sebesar **0,34%** dari hasil survey periode sebelumnya yang berada pada **86,79%**. Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan Indeks kepuasan pelanggan terhadap produk/layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Kaltim tergolong “SANGAT MEMUASKAN / SANGAT BAIK”.

  - “Item yang ***paling tinggi INDEKS KEPUASAN PELANGGAN*** nya menurut penilaian pelanggan adalah ‘***Kesopanan dan Keramahan***’ sebesar **89,40%** (Sangat Memuaskan / Sangat Baik) dan yang ***paling rendah INDEKS KEPUASAN*** nya adalah ‘***Ketepatan Waktu***’ sebesar **82,07%** (Sangat Memuaskan / Sangat Baik, Kecepatan Waktu sebesar **82,88%** (Sangat Memuaskan / Sangat Baik) serta Kesesuaian Biaya sebesar **86,14%** (Sangat Memuaskan / Sangat Baik)”.

2. Meskipun dengan hasil sangat baik tetapi dalam rangka peningkatan kepuasan pelanggan yang lebih baik lagi, maka Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Kaltim perlu melakukan upaya dengan langkah-langkah sebagai berikut :
  - Petugas dalam menangani permohonan dilakukan lebih cepat dan sesuai SOP supaya tidak ada lagi terhambat perizinan pemohon yang mengakibatkan waktu permohonan begitu lama.
  - Kesesuaian biaya dan Kewajaran Biaya akan di sinkronisasikan dengan Perda Kaltim Nomor 05 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Perda Kaltim Nomor 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu terutama Sektor Perhubungan dan Perikanan.
  - Kedepannya akan ditambah lagi keamanan terhadap pelayanan perizinan dengan penambahan CCTV di tempat-tempat rawan kejahatan.

- Untuk lahan parkir sampai sekarang sudah diperluas terutama untuk parkir kendaraan roda empat dan roda dua.
- Selain Sarana Penunjang seperti CCTV, pihak keamanan kantor untuk selalu siap dan siaga apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan dan sigap dalam melakukan pengamanan.

c) Hasil Analisa Pada Indikator Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan  
Periode Juli – Desember 2020

Secara keseluruhan *INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT / PELANGGAN* adalah sebesar **86,96%** naik sebesar **0,51 %** dari hasil survey periode sebelumnya yang berada pada **86,45%**. Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan Indeks kepuasan pelanggan terhadap produk/layanan maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Kaltim tergolong “SANGAT MEMUASKAN / SANGAT BAIK”.

Angka Indeks Kepuasan pelanggan ini adalah presentase hasil dari perbandingan antara total nilai kepuasan (realita yang dirasakan pelanggan) terhadap total nilai kepuasan pada skala tertinggi (Sangat memuaskan) yang menggambarkan sejauh mana gap / kesenjangan yang terjadi atas posisi level kepuasan yang dirasakan pelanggan terhadap standar tertinggi yang semestinya bisa diberikan oleh maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Kaltim.

Untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat telah dilakukan pengisian kuesioner dalam bentuk multiple choice dengan 4 (empat) kategori dari “a”

hingga “d” (a: sangat baik, b: Baik, c: kurang baik, d: tidak baik) dan telah diterima hasilnya dalam bentuk kuesioner yang telah dijawab atau pernyataan lain secara tertulis dari masyarakat. Untuk lebih memudahkan dalam mengukur tingkat kepuasan masyarakat, maka masing-masing kategori memiliki nilai yang berbeda. Untuk a = 4, b = 3, c = 2, d = 1.

Pelanggan / masyarakat yang telah menerima kuesioner survey indeks kepuasan masyarakat secara langsung selama enam bulan sekali (periode Juli – Desember Tahun 2020) sebanyak 99 responden. Dari ke 99 responden tersebut dapat dianalisa hasilnya secara lengkap sebagai berikut :

Gambar 3.4 Analisa Data Survey Indeks Kepuasan Masyarakat DPMPPTSP Prov. Kaltim Periode Juli – Desember Tahun 2020

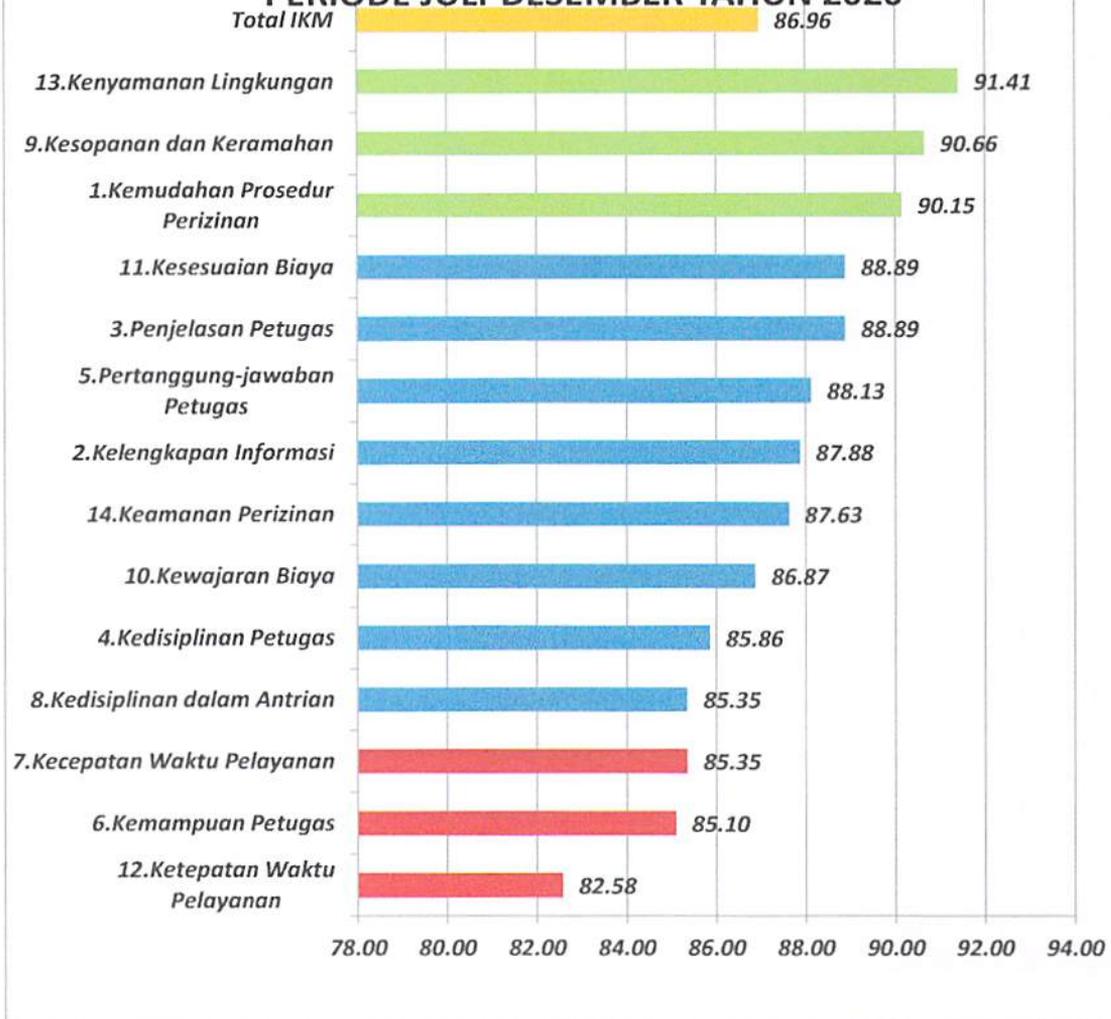
**ANALISA DATA  
SURVEY INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT  
DINAS PMPTSP PROV. KALTIM PERIODE JULI - DESEMBER TAHUN 2020**

INDIKATOR	KATEGORI	JAWABAN	NILAI	NILAI X JAWABAN	NILAI PER UNSUR	JUMLAH NILAI PER UNSUR	NRR PER UNSUR X 0,071	NILAI IKM (%) PER UNSUR
1. Kemudahan Prosedur Perizinan	A	64	4	256	357	3.61	0.256	90.152
	B	32	3	96				
	C	2	2	4				
	D	1	1	1				
2. Kelengkapan Informasi	A	52	4	208	348	3.52	0.250	87.879
	B	46	3	138				
	C	1	2	2				
	D	0	1	0				
3. Penjelasan Petugas	A	56	4	224	352	3.56	0.252	88.889
	B	42	3	126				
	C	1	2	2				
	D	0	1	0				
4. Kedisiplinan Petugas	A	45	4	180	340	3.43	0.244	85.859
	B	52	3	156				
	C	2	2	4				
	D	0	1	0				
5. Pertanggung-jawaban Petugas	A	56	4	224	349	3.53	0.250	88.131
	B	40	3	120				
	C	2	2	4				
	D	1	1	1				
6. Kemampuan Petugas	A	42	4	168	337	3.40	0.242	85.101
	B	55	3	165				
	C	2	2	4				
	D	0	1	0				
7. Kecepatan Waktu Pelayanan	A	54	4	216	338	3.41	0.242	85.354
	B	33	3	99				
	C	11	2	22				
	D	1	1	1				
8. Kedisiplinan dalam Antrian	A	43	4	172	338	3.41	0.242	85.354
	B	54	3	162				
	C	2	2	4				
	D	0	1	0				
9. Kesopanan dan Keramahan	A	62	4	248	359	3.63	0.257	90.657
	B	37	3	111				
	C	0	2	0				
	D	0	1	0				
10. Kewajaran Biaya	A	48	4	192	344	3.47	0.247	86.869
	B	50	3	150				
	C	1	2	2				
	D	0	1	0				
11. Kesesuaian Biaya	A	55	4	220	352	3.56	0.252	88.889
	B	44	3	132				
	C	0	2	0				
	D	0	1	0				
12. Ketepatan Waktu Pelayanan	A	41	4	164	327	3.30	0.235	82.576
	B	48	3	144				
	C	0	2	18				
	D	1	1	1				
13. Kenyamanan Lingkungan	A	65	4	260	362	3.66	0.260	91.414
	B	34	3	102				
	C	0	2	0				
	D	0	1	0				
14. Keamanan Perizinan	A	50	4	200	347	3.51	0.249	87.626
	B	49	3	147				
	C	0	2	0				
	D	0	1	0				
<b>Nilai IKM Total</b>							<b>3.478</b>	<b>86.96</b>

## INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT / PELANGGAN (IKM)

### DINAS PMPTSP PROV. KALTIM

#### PERIODE JULI-DESEMBER TAHUN 2020



Tiga Variabel dengan *Tingkat Kepuasan pelanggan tertinggi* adalah :

- Kenyamanan Lingkungan sebesar 91,41% (Sangat Memuaskan / Sangat Baik)
- Kesopanan dan Keramahan sebesar 90,66% (Sangat Memuaskan / Sangat Baik)
- Kemudahan Prosedur Perizinan sebesar 90,15% (Sangat Memuaskan / Sangat Baik)

Sementara tiga variabel dengan *Tingkat Kepuasan Pelanggan terendah* adalah :

- Kesesuaian Biaya sebesar 88,96% (Sangat Memuaskan / Sangat Baik)
- Penjelasan Petugas sebesar 88,89% (Sangat Memuaskan / Sangat Baik)
- Pertanggung Jawaban Petugas sebesar 88,89% (Sangat Memuaskan / Sangat Baik)

### ***Kesimpulan :***

Dari hasil pengolahan data dan analisa (tingkat kepuasan - realisasi pelayanan, tingkat kepentingan - harapan pelayanan, indeks kepuasan dan diagram kartesius) terhadap lembar kuesioner pengukuran kepuasan pelanggan terhadap produk dan pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Kaltim periode Januari - Juni Tahun 2020 diperoleh beberapa point kesimpulan sebagai berikut :

1. Secara keseluruhan ***INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT / PELANGGAN*** adalah sebesar **86,96%** menurun sebesar **0,51%** dari hasil survey periode sebelumnya yang berada pada **86,45%**. Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan Indeks kepuasan pelanggan terhadap produk/layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Kaltim tergolong “SANGAT MEMUASKAN / SANGAT BAIK”.
  - “Item yang ***paling tinggi INDEKS KEPUASAN PELANGGAN*** nya menurut penilaian pelanggan adalah ‘***Kenyamanan Lingkungan***’ sebesar **91,41%** (Sangat Memuaskan / Sangat Baik) dan yang ***paling rendah INDEKS KEPUASAN*** nya adalah ‘***Ketepatan Waktu***’ sebesar **82,58%** (Sangat Memuaskan / Sangat Baik)
2. Meskipun dengan hasil sangat baik tetapi dalam rangka peningkatan kepuasan pelanggan yang lebih baik lagi, maka Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Kaltim perlu melakukan upaya dengan langkah-langkah sebagai berikut :
  - Petugas dalam menangani permohonan dilakukan lebih cepat dan sesuai SOP supaya tidak ada lagi terhambat perizinan pemohon yang mengakibatkan waktu permohonan begitu lama.
  - Kesesuaian biaya dan Kewajaran Biaya akan di sinkronisasikan dengan Perda Kaltim Nomor 05 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Perda Kaltim Nomor 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu terutama Sektor Perhubungan dan Perikanan.
  - Kedepannya akan ditambah lagi keamanan terhadap pelayanan perizinan dengan penambahan CCTV di tempat-tempat rawan kejahatan.
  - Untuk lahan parkir sampai sekarang sudah diperluas terutama untuk parkir kendaraan roda empat dan roda dua.

- Selain Sarana Penunjang seperti CCTV, pihak keamanan kantor untuk selalu siap dan siaga apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan dan sigap dalam melakukan pengamanan.

## 6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.14 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
		( $\geq 100\%$ )		
1	2	4	5	6 (4-5)
1	Meningkatnya Realisasi Investasi	147,31%	65,34%	81,97%

Sumber : *Press release realisasi investasi triwulan IV Tahun 2020 dan Laporan Realisasi Anggaran Periode 31 Desember 2020*

Dari tabel diatas dapat dilihat tingkat efesiensi antara penyerapan anggaran dan capaian kinerja cukup baik yaitu sebesar 147,31%, pencapaian kinerja tersebut tentunya tidak hanya di tunjang oleh anggaran yang di sediakan akan tetapi merupakan sinergitas bersama stakeholder bidang perizinan dan non perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur.

7. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Anggaran Program/ Kegiatan

Tabel 3.15 Analisis Atas Penggunaan Anggaran Progam/ Kegiatan

Tahun	Anggaran Belanja	Realisasi	Nilai Efisiensi	Persentase	Total APBD		Jumlah Program/ Kegiatan Yang Dialokasikan		Total Program/ Kegiatan		Ket
					Belanja Pegawai	Belanja Gaji dan Tunjangan	Program	Kegiatan	Program	Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2020	26.003.760.790	18.012.575.871	30,73%	69,27%	6.467.860.935	9.740.012.000	9	19	9	19	-

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Periode 31 Desember 2020

## D. Realisasi Anggaran

Tabel 3.16 Realisasi Keuangan

Realisasi Keuangan Per 31 Desember 2020 (APBD-P)					
Jenis Belanja	APBD-MURNI	APBD-P	Pagu Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%
Belanja Tidak Langsung	9.308.012.000	432.000.000	9.740.012.000	6.467.860.935	<b>66,40</b>
Belanja Langsung	19.067.691.080	(2.803.942.290)	16.263.748.790	11.544.714.936	<b>70,98</b>
<b>Total</b>	<b>28.375.703.080</b>	<b>2.371.942.290</b>	<b>26.003.760.790</b>	<b>18.012.575.871</b>	<b>69,26</b>

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Periode 31 Desember 2020

Pada tabel diatas dapat dijelaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Murni dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) pada tahun anggaran 2020 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur, memperoleh alokasi anggaran sebesar **Rp. 26.003.760.790,-** yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp. 9.740.012.000,- dan Belanja Langsung Rp. 16.263.748.790,-

### 1. Realisasi Anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja

Tabel 3.17 Realisasi Anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Realisasi Investasi	33,08	31,38	105,42 %	Rp 9.740.012.000	Rp. 6.467.860.935	88,13%
		89,00	86,96	97,71 %	Rp 16.263.748.790	Rp 11.544.714.936	92,22%
Jumlah					Rp 26.003.760.790	Rp 18.012.575.871	69,26%
<b>Total Belanja Langsung</b>					<b>Rp 16.263.748.790</b>	<b>Rp 11.544.714.936</b>	<b>70,98%</b>

Sumber : 1. Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2020  
2. Laporan Pencapaian Kinerja Tahun Anggaran 2020  
3. Laporan Realisasi Anggaran Periode 31 Desember 2020

Pada tabel 3.18 diatas dapat dijelaskan secara singkat bahwa pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan Perjanjian Kinerja tidak dapat terlaksana dengan baik, dan mengenai target yang sudah ditentukan, yaitu nilai realisasi investasi yang dimana diketahui memiliki target Rp. 33,08 Triliun dan pada saat *Press Release* Tw. IV realisasi nilai investasi mencapai Rp. 31,38 Triliun dengan pencapaian kinerja 105,42%, hal tersebut terjadi karena

karena pada saat ini telah terjadi pandemi covid 19, yang terjadi dan telah di rasakan oleh beberapa negara di dunia.

## 2. Realisasi Anggaran Per Program dan Kegiatan

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPPA) tahun anggaran 2020 telah dialokasikannya anggaran di 9 (sembilan) program dan 19 (sembilan belas) kegiatan yang menjadi pelaksanaan kegiatan selama satu tahun, maka dijabarkan realisasi anggaran per program dan kegiatan pada tahun anggaran 2020 sebagai berikut :

### i. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pada program ini terdapat kegiatan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran (PAP), yang dimana didalam kegiatan ini merupakan penganggaran untuk kegiatan operasional seperti, pembayaran gaji non PNS, biaya listrik, air, telepon, biaya *fotocopy*/cetak/penggandaan, honor-honor pengelola keuangan dan pembayaran operasional lainnya untuk mendukung kegiatan perkantoran.

Tabel 3.18 Realisasi Anggaran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

No	Program/kegiatan	Anggaran			Keterangan
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>3.829.194.330</b>	<b>3.580.927.986</b>	<b>93,52</b>	
1	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	3.829.194.330	3.580.927.986	93,52	
Jumlah					
<b>Total Belanja Langsung</b>		<b>16.263.748.790</b>	<b>11.544.714.936</b>	<b>70,98</b>	

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Periode 31 Desember 2020

Pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan dan kegiatan operasional pada program Pelayanan Administrasi Perkantoran berjalan dengan baik, walaupun terdapat jumlah sisa anggaran, maka dapat dijelaskan penyebab sisa lebih pembiayaan anggaran sebagai berikut :

Pada tahun 2020 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp3.829.194.330,00 dan terealisasi sebesar Rp3.580.927.986,00 atau 93,52%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp2.798.980.062,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp781.947.924,00 atau 27,94%. Masih terdapat sisa anggaran dikarenakan adanya efisiensi anggaran dan beberapa kegiatan yang realisasinya menyesuaikan dengan kebutuhan seperti belanja BBM, telepon, air, listrik dan pajak kendaraan bermotor.

ii. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pada program ini terdapat kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana, yang dimana didalam kegiatan ini merupakan penganggaran pengadaan sarana dan prasarana seperti kegiatan pemeliharaan gedung kantor dan pengadaan barang/ belanja modal.

Tabel 3.19 Realisasi Anggaran Program Sarana dan Prasarana Aparatur

No	Program/kegiatan	Anggaran			Keterangan
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5	6
<b>II</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>1.818.141.960</b>	<b>1.564.741.900</b>	<b>86,06</b>	
2	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	903.810.000	869.770.000	96,23	
3	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	914.331.960	694.971.900	76,01	
Jumlah					
<b>Total Belanja Langsung</b>		<b>16.263.748.790</b>	<b>11.544.714.936</b>	<b>70,98</b>	

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Periode 31 Desember 2020

Pada tabel 3.20 di atas, dapat di jelaskan bahwa peng angggarkan sebesar Rp1.818.141.960,00 pada Program Sarana dan Prasarana Aparatur. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp1.564.741.900,00 atau 86,06%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun lalu sebesar Rp1.658.060.052,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp(93.318.152,00) atau (5,63)%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang ditetapkan telah

tercapai. Adapun sisa anggaran berasal dari sisa-sisa pengadaan dan ada beberapa kegiatan yang realisasinya menyesuaikan dengan kebutuhan dan tidak terprediksi.

iii. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

Pada program ini terdapat kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah, didalam kegiatan ini sebagian besar untuk pendanaan atau pembiayaan perjalanan dinas dalam dan luar daerah. Pada kegiatan ini bersifat antisipatif/ undangan apabila ada undangan kegiatan akan dilaksanakan dan tidak dapat diprediksi secara pasti serta sebagian besar keputusan pelaksanaan kegiatan ini adalah kewenangan kepala dinas.

Tabel 3.20 Realisasi Anggaran Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

No	Program/kegiatan	Anggaran			Keterangan
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5	6
III	<b>Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah</b>	<b>3.989.725.000</b>	<b>3.011.591.750</b>	<b>75,48</b>	
4	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	3.989.725.000	3.011.591.750	75,48	
Jumlah					
<b>Total Belanja Langsung</b>		<b>16.263.748.790</b>	<b>11.544.714.936</b>	<b>70,98</b>	

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Periode 31 Desember 2020

Pada Tabel 3.20 di atas dengan anggaran sebesar Rp3.989.725.000,00 pada Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp3.011.591.750,00 atau 75,48%. Bila dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp3.548.226.477,80 maka terjadi penurunan sebesar Rp(536.634.727,80) atau (15,12)%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang ditetapkan telah tercapai.

iv. Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah

Pada program ini terdapat kegiatan 2 (dua) kegiatan yaitu ; Kegiatan Penyusunan

Dokumen Perencanaan Anggaran dan Kegiatan Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan, didalam kegiatan ini merupakan penganggaran dan pelaksanaan kegiatan Sub. Bagian Perencanaan Proqram (Rengram).

Tabel 3.21 Realisasi Anggaran Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah

No	Program/kegiatan	Anggaran			Keterangan
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5	6
IV	<b>Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	<b>279.337.500</b>	<b>202.022.500</b>	<b>73,32</b>	
5	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	181.050.000	134.589.000	74,34	
6	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	98.287.500	67.433.500	68,61	
Jumlah					
<b>Total Belanja Langsung</b>		<b>16.263.748.790</b>	<b>11.544.714.936</b>	<b>70,98</b>	

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Periode 31 Desember 2020

Pada tabel 3.21 dapat dijelaskan bahwa didalam kegiatan Sub. Bagian Perencanaan Program sebesar Rp279.337.500,00 pada Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp202.022.500,00 atau 73,32%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun lalu sebesar Rp272.615.000,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp(70.592.500,00) atau (25,89)%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang ditetapkan telah tercapai.

v. Program Kemudahan Pelayanan dan Percepatan Proses Perizinan

Program ini merupakan salah satu program prioritas yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023, program ini terdapat 4 (empat) kegiatan : pelayanan perizinan sektor primer; sekunder-tercier; pelayanan penanaman modal; dan Penguatan Kelembagaan PTSP Kab/Kota. Kegiatan yang biasa dilakukan mengupgrade ISO Standar Manajemen Mutu, mengevaluasi *Standart Operating Procedure* (SOP), penerbitan izin usaha, peninjauan lapangan/ lokasi, dan sosialisasi penggunaan aplikasi izin usaha berbasis

online seperti *Online Single Submission (OSS)*.

Tabel 3.22 Realisasi Anggaran Program Kemudahan Pelayanan dan Percepatan Proses Perijinan

No	Program/kegiatan	Anggaran			Keterangan
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5	6
V	<b>Program Kemudahan pelayanan dan percepatan proses perijinan</b>	<b>1.390.075.000</b>	<b>334.935.000</b>	<b>24,09</b>	
7	Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan perizinan sektor primer	608.725.000	148.272.500	24,36	
8	Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan perizinan sektor sekunder dan tersier	88.850.000	4.062.500	4,57	
9	Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal	187.300.000	131.500.000	70,21	
10	Penguatan Kelembagaan PTSP Kab/Kota	505.200.000	51.100.000	10,11	
Jumlah					
<b>Total Belanja Langsung</b>		<b>16.263.748.790</b>	<b>11.544.714.936</b>	<b>70,98</b>	

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Periode 31 Desember 2019

Pada tabel 3.22 diatas dapat terlihat pada anggaran sebesar Rp1.390.075.000,00 pada Program Kemudahan Pelayanan dan Percepatan Proses Perijinan. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp334.935.000,00 atau 24,09%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun lalu sebesar Rp189.448.200,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp145.486.800,00 atau 76,80%. Realisasi masih belum mencapai target karena banyak kegiatan yang pelaksanaannya terkendala pandemi Covid-19.

#### Program Pengendalian Pelaksanaan Investasi

Program ini juga merupakan salah satu program prioritas yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023. Pada program ini terdapat 3 (tiga) kegiatan yaitu, kegiatan pemantauan dan evaluasi; kegiatan pembinaan dan pengawasan; serta kegiatan pengolahan data. Kegiatan yang dilakukan antara lain ; pelaksanaan ISO,

pemantauan lapangan/ perusahaan, pengisian LKPM manual/ Online, Press Realease Data Investasi yang dilakukan per triwulan dan membuat buku mengenai data investasi.

Tabel 3.23 Realisasi Anggaran Program Pengendalian Pelaksanaan Investasi

No	Program/kegiatan	Anggaran			Keterangan
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5	6
<b>VI</b>	<b>Program Pengendalian Pelaksanaan Investasi</b>	<b>705.000.000</b>	<b>288.939.000</b>	<b>40,98</b>	
11	Pemantauan dan evaluasi Penanaman Modal	83.600.000	0,00	0,00	
12	Penyusunan informasi penanaman modal	226.000.000	98.439.000	43,56	
13	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Investasi	395.400.000	190.500.000	48,18	
Jumlah					
<b>Total Belanja Langsung</b>		<b>16.263.748.790</b>	<b>11.544.714.936</b>	<b>70,98</b>	

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Periode 31 Desember 2020

Pada tabel 3.23 diatas dengan anggaran sebesar Rp705.000.000,00 pada Program Pengendalian Pelaksanaan Investasi. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp288.939.000,00 atau 40,98%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun lalu sebesar Rp478.219.000,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp(189.280.000,00) atau (39,58)%. Realisasi anggaran masih rendah karena dampak Covid-19 dan adanya rasionalisasi anggaran pada triwulan II.

#### Program Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Pada program ini terdapat 2 (dua) kegiatan yaitu, kegiatan penyusunan perencanaan dan kebijakan penanaman modal ; dan penyusunan kajian pengembangan potensi daerah. Kegiatan yang dilakukan antara lain ; pelaksanaan kajian kebijakan seperti membuat atau revisi Perda/Pergub dan membuat kajian potensi unggulan daerah.

Tabel 3.24 Realisasi Anggaran Program Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal

No	Program/kegiatan	Anggaran			Keterangan
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5	6
<b>VII</b>	<b>Program Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal</b>	<b>1.579.500.000</b>	<b>1.449.615.000</b>	<b>91,78</b>	
14	Penyusunan Perencanaan dan Kebijakan Penanaman Modal	820.250.000	753.790.000	91,90	
15	Penyusunan Kajian Pengembangan Potensi Daerah	759.250.000	695.825.000	91,65	
Jumlah					
<b>Total Belanja Langsung</b>		<b>16.263.748.790</b>	<b>11.544.714.936</b>	<b>70,98</b>	

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Periode 31 Desember 2020

Pada tabel 3.24 pada Program Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman modal telah menganggarkan sebesar Rp1.579.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.449.615.000,00 atau 91,78%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun lalu sebesar Rp531.570.000,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp918.045.000,00 atau 172,70%. Meskipun masih terdapat sisa anggaran, namun target yang telah ditetapkan telah tercapai, hal ini disebabkan antara lain efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2020.

vi. Program Layanan Advokasi dan Informasi Perizinan

Pada program ini terdapat 2 (dua) kegiatan yaitu, kegiatan pelayanan informasi perizinan ; dan pelayanan advokasi perizinan. Kegiatan yang dilakukan antara lain ; pengembangan media elektronik yang difokuskan kepada Sistem Informasi berbasis *Online* guna memberi informasi yang cepat kepada masyarakat luas sedangkan pada kegiatan penguatan kelembagaan PTSP bertujuan untuk menjaga status berpredikat bintang dengan cara mengevaluasi Sistem Prosedur Operasional, melakukan koordinasi dan menjalin komunikasi dengan baik antara Kabupaten/ Kota, Provinsi maupun Pusat.

Tabel 3.25 Realisasi Anggaran Program Layanan Advokasi dan Informasi Perizinan

No	Program/kegiatan	Anggaran			Keterangan
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5	6
VIII	<b>Program Layanan Advokasi dan Informasi Perizinan</b>	<b>776.775.000</b>	<b>399.780.000</b>	<b>51,47</b>	
16	Pelayanan informasi perizinan	503.090.000	261.910.000	52,06	
17	Pelayanan Advokasi Perizinan	273.685.000	137.870.000	50,38	
Jumlah					
<b>Total Belanja Langsung</b>		<b>16.263.748.790</b>	<b>11.544.714.936</b>	<b>70,98</b>	

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Periode 31 Desember 2020

Pada tabel 3.25 dengan anggaran sebesar Rp776.775.000,00 pada Program Layanan Advokasi dan Informasi Perizinan. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp399.780.000,00 atau 51,47%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun lalu sebesar Rp95.597.500,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp304.182.500,00 atau 318,19%. Realisasi anggaran masih rendah karena dampak adanya rasionalisasi anggaran pada triwulan II sehingga beberapa kegiatan tertunda pelaksanaannya hingga terbitnya APBD-P diakhir bulan Oktober.

vii. Program Penyelenggaraan Promosi dan Pemberdayaan Dunia Usaha

Pada program ini terdapat 2 (dua) kegiatan yaitu, kegiatan penyelenggaraan promosi penanaman modal ; dan peningkatan kerjasama penanaman modal. Kegiatan yang dilakukan antara lain ; pelaksanaan event-event pameran guna mempromosikan potensi dan peluang untuk berinvestasi, dan pelaksanaan penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU).

Tabel 3.26 Realisasi Anggaran Program Penyelenggaraan Promosi dan Pemberdayaan Dunia Usaha

No	Program/kegiatan	Anggaran			Keterangan
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1	2	3	4	5	6
IX	<b>Program Penyelenggaraan Promosi dan Pemberdayaan Dunia Usaha</b>	<b>1.896.000.000</b>	<b>712.161.800</b>	<b>37,56</b>	
18	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	1.630.000.000	712.161.800	43,69	
19	Peningkatan Kerjasama Penanaman Modal	266.000.000	-	0,00	
Jumlah					
<b>Total Belanja Langsung</b>		<b>16.263.748.790</b>	<b>11.544.714.936</b>	<b>70,98</b>	

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Periode 31 Desember 2020

Pada tabel 3.26, Pada anggaran sebesar Rp1.896.000.000,00 pada Program Penyelenggaraan Promosi dan Pemberdayaan Dunia Usaha. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp712.161.800,00 atau 37,56%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun lalu sebesar Rp598.493.375,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp113.668.425,00 atau 18,99%. Rendahnya realisasi anggaran karena dampak pandemi Covid-19 yang membatasi mobilitas masyarakat akibat adanya kebijakan untuk melakukan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dan himbauan *physical distancing* lainnya sehingga beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan.

Pada tahun 2020 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp1.630.000,00 dan terealisasi sebesar Rp712.161.800,00 atau 43,69%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun lalu maka terjadi kenaikan sebesar Rp113.668.425,00 atau 18,99%. Realisasi anggaran tidak mencapai target yang ditetapkan akibat pandemi Covid-19 yang menyebar hampir di seluruh dunia sehingga event-event pameran maupun exhibition yang dilaksanakan diluar dan didalam negeri mengalami hambatan. Beberapa event organizer membatalkan penyelenggaraan pameran yang telah terjadwal karena adanya kebijakan pembatasan sosial untuk menekan penyebaran virus Covid-19.

Pada tahun 2020 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp266.000.000,00 dan tidak terealisasi seperti tahun sebelumnya. Anggaran tahun 2020 tidak terealisasi karena melihat perkembangan wabah Covid-19 maka kegiatan pertemuan-pertemuan dalam rangka pelaksanaan Mou kerjasama antar pemerintah provinsi maupun pertemuan yang memfasilitasi *stakeholder* dan pelaku usaha tidak dapat dilaksanakan.

### **Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan**

Secara keseluruhan pencapaian target masih belum memuaskan karena dalam pelaksanaan kegiatan terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain:

- Merebaknya pandemi Covid-19 di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat yang cukup ketat di awal-awal merebaknya wabah Covid-19 yang menyebabkan beberapa kegiatan tertunda atau bahkan dibatalkan pelaksanaannya.
- Ada beberapa kegiatan yang dianggarkan setelah perubahan APBD sehingga rentang waktu pelaksanaannya singkat, hal ini menyebabkan kurang maksimalnya pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan bahkan ada yang tidak dapat dilaksanakan.
- Masih kurangnya tingkat kecermatan dan ketertiban dalam perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dikelola Bidang-bidang di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur.

## BAB IV

### PENUTUP

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur tahun 2020 kami buat berdasarkan realita yang ada.

Dari uraian tersebut serta dari hasil capaian kinerja kegiatan, menunjukkan bahwa pelaksana kebijakan, program dan kegiatan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur tahun 2020 berjalan dengan baik serta mendapatkan hasil (*outcome*) sesuai yang diharapkan. Untuk mencapai hasil yang optimal memang masih dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dan eksternal.

Dengan adanya LKjIP ini, diharapkan kualitas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur akan terus meningkat sehingga program/kegiatan yang telah disusun pada tahun berikutnya dapat terealisasi dengan tingkat persentasi yang semakin tinggi.

## LAMPIRAN



# PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)

Website : <http://dpmptsp.kaltimprov.go.id> email : [dpmptsp.kaltim@gmail.com](mailto:dpmptsp.kaltim@gmail.com),  
[dpmptsp@kaltimprov.go.id](mailto:dpmptsp@kaltimprov.go.id) email PTSP : [iso.ptspbppmd@gmail.com](mailto:iso.ptspbppmd@gmail.com), twitter : @dpmptsp\_kaltim  
Jl. Basuki Rahmat No. 56 Telp.: (0541) 743235, 743487, 201372 Fax : (0541) 736446  
SAMARINDA 75112

## PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

### PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : PUGUH HARJANTO, S.STP., M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)  
Provinsi Kalimantan Timur

#### Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Ir. H. ISRAN NOOR, M.Si

Jabatan : Gubernur Kalimantan Timur

#### Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, Januari 2021

Pihak Kedua,  
Gubernur Kalimantan Timur

Dr. Ir. H. ISRAN NOOR, M.Si



Pihak Pertama,  
Kepala DPMPTSP Prov. Kaltim

PUGUH HARJANTO, S.STP., M.Si

Pembina Tingkat I / IVb  
NIP. 197908101998021001

**LAMPIRAN PROGRAM/KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN  
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR T. A. 2021**

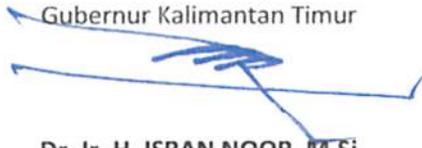
No	Program	Jumlah Anggaran (Rp)
1	2	3
1.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	2.030.000.000
2.	Program Pelayanan Penanaman Modal	1.760.000.000
3.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	1.690.013.950
4.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	560.000.200
5.	Program Promosi Penanaman Modal	1.360.000.000
6.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	17.093.182.850
<b>6 Program</b>		<b>24.493.197.000</b>

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Realisasi Investasi Sektor Non Migas dan Non Batubara	Nilai Investasi	26,56 (Rp Triliun)
2.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM )	85 Skor

Samarinda, Januari 2021

Pihak Kedua,  
Gubernur Kalimantan Timur



Dr. Ir. H. ISRAN NOOR, M.Si

Pihak Pertama,  
Kepala DPMPTSP Prov. Kaltim



PUGUH HARJANTO, S.STP., M.Si

Pembina Tingkat I / IVb  
NIP. 19640101 199003 1 028